



REPUBLIK INDONESIA

**SUPLEMEN
LKPP TAHUN 2013**

**INFORMASI PENDAPATAN DAN
BELANJA SECARA AKRUAL**



MEI 2014



REPUBLIK INDONESIA

SUPLEMEN LKPP TAHUN 2013

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

MEI 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I LATAR BELAKANG	1
A. Dasar Hukum	1
B. Kondisi	1
BAB II INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL	2
A. Proses Penyusunan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua	2
B. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua	2
C. Informasi Pendapatan Secara Akrua	4
D. Informasi Belanja Negara Secara Akrua	5
BAB III PENJELASAN INFORMASI AKRUAL	8
A. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	8
B. Pendapatan Diterima Dimuka	9
C. Belanja yang Masih Harus Dibayar	9
D. Belanja Dibayar Dimuka	10
LAMPIRAN	12

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diterbitkan;
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 70 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah untuk menyajikan pendapatan dan belanja negara berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008;
3. UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P Tahun Anggaran 2013);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

B. Kondisi

1. Upaya Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Akrual di Indonesia

Sejak dikeluarkannya paket UU di bidang Keuangan Negara, Pemerintah telah mempersiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi akrual di Indonesia. Pada Tahun 2005, Pemerintah telah menetapkan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur bahwa pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual. Basis ini kemudian dikenal dengan sebutan Basis Kas Menuju Akrual (*Cash Towards Accrual*) yang merupakan jembatan untuk memenuhi kebutuhan penerapan anggaran berbasis kas dan kebutuhan untuk penyajian neraca Pemerintah. Untuk menghasilkan LKPP yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga telah mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis Kas Menuju Akrual.

Dalam rangka memenuhi ketentuan UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004, Pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005. PP No. 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat tahun 2015. Pemerintah Pusat telah menyusun langkah strategis untuk pelaksanaan akrual tersebut.

2. Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana diamanatkan oleh paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah seharusnya telah menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual tahun 2008. Namun, dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) penyelenggara akuntansi yang masih kurang, baik dalam hal jumlah maupun kompetensi, bukan hal yang mudah untuk melaksanakan amanat UU di bidang Keuangan Negara tersebut.

Dalam Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tanggal 25 September 2008 yang membahas mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah RI, disepakati bahwa pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009 secara bertahap. Basis akrual diterapkan secara penuh pada Badan Layanan Umum yang secara organisasi sudah siap melaksanakannya.

Untuk pelaporan keuangan tahun 2013, informasi akrual tetap disajikan dalam suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013, yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Untuk penyeragaman

mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.

II. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

A. Proses Penyusunan Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disusun berdasarkan informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan informasi pada Bendahara Umum Negara dengan mengacu kepada Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Informasi pendapatan secara akrual diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas yang disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual. Informasi belanja secara akrual diperoleh dari realisasi belanja berbasis kas yang disesuaikan dengan transaksi belanja akrual.

Cakupan transaksi pendapatan dan belanja secara akrual adalah sebagai berikut:

1. Transaksi pendapatan secara akrual yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan yang masih harus diterima; dan/atau
 - b. Pendapatan diterima di muka.
2. Transaksi belanja secara akrual yang terdiri dari:
 - a. Belanja yang masih harus dibayar; dan/atau
 - b. Belanja dibayar di muka.

Sesuai dengan Pasal 2 Perdirjen Perbendaharaan Nomor 62 Tahun 2009, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyajikan informasi pendapatan dan belanja secara akrual untuk tingkat pemerintah pusat yang disusun berdasarkan informasi pendapatan dan belanja secara akrual yang dilampirkan dalam LKKL dan informasi pada Bendahara Umum Negara. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual tingkat pemerintah pusat disajikan sebagai suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahunan.

B. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

Penggunaan basis akrual pada pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja secara akrual bermanfaat untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai posisi keuangan pemerintah dan dapat menyajikan informasi tentang penggunaan atau penerimaan sumber daya ekonomi yang lebih baik. Basis akrual tidak hanya mempertimbangkan unsur kas dalam pencatatan pendapatan dan belanja, namun juga memperhitungkan hak-hak dan/atau kewajiban pemerintah yang timbul terkait dengan penerimaan/pengeluaran kas tersebut.

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual disusun berdasarkan data pendapatan dan belanja secara akrual dari seluruh K/L. Informasi pendapatan dan belanja akrual pemerintah untuk tahun 2013 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2013
(dalam rupiah)

Uraian	REALISASI MENURUT BASIS KAS *)	PENYESUAIAN AKRUAL		REALISASI MENURUT BASIS AKRUAL
		TAMBAH	KURANG	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan	1.077.309.220.752.239	42.858.185.051.723	23.101.440.433.394	1.097.065.965.370.568
1. Pajak Dalam Negeri	1.029.850.272.828.329	42.391.051.901.659	22.800.992.894.894	1.049.440.331.835.094
2. Pajak Perdagangan Internasional	47.458.947.923.910	467.133.150.064	300.447.538.500	47.625.633.535.474
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	353.811.044.719.131	18.793.161.028.535	12.545.207.268.960	360.058.998.478.706
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	226.356.940.915.643	16.644.990.000.000	-	243.001.930.915.643
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	34.025.604.050.283	-	-	34.025.604.050.283
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	68.779.953.825.624	2.075.417.387.560	12.256.758.011.376	58.598.613.201.808
4. Pendapatan BLU	24.648.545.927.581	72.753.640.975	288.449.257.584	24.432.850.310.972
III. Penerimaan Hibah	6.855.323.282.297	-	-	6.855.323.282.297
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1.437.975.588.753.667	61.651.346.080.258	35.646.647.702.354	1.463.980.287.131.571
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.137.162.887.298.240	156.236.245.588.905	424.877.966.073	1.292.974.254.921.072
1. Belanja Pegawai	221.688.819.162.644	1.265.639.008.264	83.488.907.900	222.870.969.263.008
2. Belanja Barang	169.722.685.080.370	1.221.436.737.935	239.082.928.506	170.705.038.889.799
3. Belanja Modal	180.864.203.133.334	-	-	180.864.203.133.334
4. Pembayaran Bunga Utang	113.035.490.483.582	39.011.672.886.188	-	152.047.163.369.770
5. Subsidi	355.045.179.958.292	26.363.997.214.868	-	381.409.177.173.160
6. Belanja Hibah	1.302.956.172.580	-	-	1.302.956.172.580
7. Bantuan Sosial	92.136.072.115.501	-	-	92.136.072.115.501
8. Belanja Lain-lain	3.367.481.191.937	38.256.566.060	102.306.129.667	3.303.431.628.330
9. Penyusutan	-	65.593.511.804.691	-	65.593.511.804.691
10. Penyisihan Piutang	-	22.741.731.370.899	-	22.741.731.370.899
II. Transfer ke Daerah	513.260.443.170.637	17.251.685.209.288	541.498.869.386	529.970.629.510.539
1. Dana Perimbangan	430.354.730.161.983	17.251.685.209.288	440.514.792.439	447.165.900.578.832
a. Dana Bagi Hasil	88.463.060.120.183	17.251.685.209.288	440.514.792.439	105.274.230.537.032
b. Dana Alokasi Umum	311.139.289.165.000	-	-	311.139.289.165.000
c. Dana Alokasi Khusus	30.752.380.876.800	-	-	30.752.380.876.800
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	82.905.713.008.654	-	100.984.076.947	82.804.728.931.707
a. Dana Otonomi Khusus	13.445.571.566.000	-	-	13.445.571.566.000
b. Dana Penyesuaian	69.460.141.442.654	-	100.984.076.947	69.359.157.365.707
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1.650.423.330.468.877	173.487.930.798.193	966.376.835.459	1.822.944.884.431.611

*) Realisasi Pendapatan Menurut Basis Kas Berdasarkan Realisasi Pendapatan yang Dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga (LKKL)

C. Informasi Pendapatan Secara Akruwal

Realisasi pendapatan negara dan hibah secara akruwal pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.463.980.287.131.571 yang diperoleh dengan cara menambahkan pendapatan-pendapatan yang telah menjadi hak Pemerintah, namun belum diterima pembayarannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dan kemudian mengurangkannya dengan pendapatan-pendapatan yang diterima di muka selama tahun anggaran 2013.

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, jumlah realisasi pendapatan menurut basis akruwal lebih tinggi daripada jumlah realisasi pendapatan menurut basis kas. Selisih antara realisasi pendapatan menurut basis kas dan realisasi pendapatan menurut basis akruwal adalah sebesar Rp26.004.698.377.904 yang merupakan selisih pendapatan yang masih harus diterima Pemerintah sebesar Rp61.651.346.080.258 dengan pendapatan diterima di muka sebesar Rp35.646.647.702.354.

Ikhtisar informasi pendapatan secara akruwal disajikan sebagai berikut.

I. Penerimaan Perpajakan

Nilai penerimaan perpajakan pemerintah berdasarkan basis akruwal sebesar Rp1.097.065.965.370.568 bersumber dari:

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri secara akruwal sebesar Rp1.049.440.331.835.094 yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak Penghasilan	514.419.847.673.707
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	388.753.400.677.455
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	28.811.040.971.467
Pendapatan Cukai	111.366.667.148.056
Pendapatan Pajak Lainnya	6.089.375.364.409
Total	1.049.440.331.835.094

2. Pajak Perdagangan Internasional secara akruwal sebesar Rp47.625.633.535.474 yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Bea Masuk	31.806.519.751.244
Pendapatan Bea Keluar	15.819.113.784.230
Total	47.625.633.535.474

II. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Nilai PNBP berdasarkan basis akruwal adalah sebesar Rp360.058.998.478.706 yang terdiri dari:

1. Penerimaan Sumber Daya Alam secara akruwal sebesar Rp243.001.930.915.643 yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Minyak Bumi	143.158.594.082.382
Pendapatan Gas Bumi	77.115.815.965.201
Pendapatan Pertambangan Umum	18.571.870.617.886
Pendapatan Kehutanan	3.060.553.275.498
Pendapatan Perikanan	228.207.036.120
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	866.889.938.556
Total	243.001.930.915.643

2. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN secara akruwal sebesar Rp34.025.604.050.283 sama dengan pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN secara kas (LRA).

3. PNBP Lainnya secara akrual sebesar Rp58.598.613.201.808 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	24.381.880.506.337
Pendapatan Jasa	27.379.676.608.306
Pendapatan Bunga	(7.103.766.306.465)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	277.756.118.837
Pendapatan Pendidikan	2.256.685.365.402
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.883.806.348
Pendapatan Iuran dan Denda	1.459.289.157.980
Pendapatan Lain-Lain	9.668.207.945.063
Total	58.598.613.201.808

4. Pendapatan Badan Layanan Umum secara akrual sebesar Rp24.432.850.310.972 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	21.491.768.586.317
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	107.235.864.320
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.336.821.571.091
Pendapatan BLU Lainnya	1.497.024.289.244
Total	24.432.850.310.972

III. Penerimaan Hibah

Nilai Penerimaan Hibah secara akrual adalah sebesar Rp6.855.323.282.297 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	1.618.817.271.505
Pendapatan Hibah Luar Negeri	5.236.506.010.792
Total	6.855.323.282.297

Ringkasan dan rincian lengkap informasi pendapatan secara akrual disajikan pada Lampiran 1.

D. Informasi Belanja Negara Secara Akrual

Realisasi belanja negara secara akrual pada tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp1.822.944.884.431.611 diperoleh dengan cara menambahkan seluruh belanja negara kecuali belanja modal yang masih harus dibayar oleh Pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 pada realisasi belanja negara menurut basis kas, ditambah dengan penyusutan dan penyisihan piutang dan kemudian mengurangkannya dengan belanja negara yang dibayar di muka kecuali belanja modal yang terjadi selama tahun anggaran 2013.

Sebagaimana disajikan dalam Tabel 1, jumlah belanja negara menurut basis akrual lebih besar daripada jumlah realisasi belanja negara menurut basis kas. Selisih antara realisasi belanja negara menurut basis kas dan realisasi belanja negara menurut basis akrual adalah sebesar Rp172.521.553.962.734 yang merupakan selisih belanja negara yang masih harus dibayar Pemerintah sebesar Rp173.487.930.798.193 dengan belanja dibayar di muka sebesar Rp966.376.835.459.

Informasi belanja negara secara akrual mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Ikhtisar informasi belanja secara akrual disajikan sebagai berikut.

I. Belanja Pemerintah Pusat

Total Belanja Pemerintah Pusat berbasis akrual adalah sebesar Rp1.292.974.254.921.072 yang bersumber dari:

1. Belanja Pegawai secara akrual senilai Rp222.870.969.263.008 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76.383.945.750.391
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	33.844.143.439.596
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	696.238.240.560
Belanja Gaji Dokter PTT	1.041.867.532.888
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	293.116.683.423
Belanja Honorarium	1.861.684.864.420
Belanja Lembur	659.273.099.711
Belanja Vaksinasi	274.929.984.523
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	26.343.958.358.144
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	78.462.009.589.533
Belanja Asuransi Kesehatan	2.780.398.781.917
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902
Total	222.870.969.263.008

2. Belanja Barang secara akrual senilai Rp170.705.038.889.799 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Barang Operasional	27.424.473.779.785
Belanja Barang Non Operasional	50.395.336.862.275
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	132.633.509
Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah	338.877.631.430
Belanja Jasa	21.222.046.500.770
Belanja Jasa untuk Transaksi Non Kas	(7.504.946)
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	1.441.182.360.013
Belanja Pemeliharaan	13.182.084.003.710
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	24.376.175.679.740
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.165.212.320.557
Belanja Barang BLU	17.587.273.813.077
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat atau Pemda	9.890.303.126.341
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemda	318.646.498.970
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.363.301.184.568
Total	170.705.038.889.799

3. Belanja Modal LRA senilai Rp180.864.203.133.334. Pada daftar informasi akrual menjadi Rp0 karena belanja modal akrual adalah konsumsi/penurunan aset tetap yang dilakukan pada tahun 2013. Alasan tersebut dilaksanakan melalui penyusutan.

4. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang secara akrual Rp152.047.163.369.770 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	106.726.173.806.286
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	8.861.197.134.070
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	17.081.501.364.200

Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	17.035.970.839.080
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	722.579.964.500
Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	1.221.688.009.000
Belanja Pembayaran Denda	398.052.252.634
Total	152.047.163.369.770

5. Belanja Subsidi secara akrual Rp381.409.177.173.160 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – BBM	228.955.471.803.142
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – Non BBM	149.810.258.696.143
Belanja Subsidi Lembaga Non-Kuangan – PSO	1.518.338.803.983
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.125.107.869.892
Total	381.409.177.173.160

6. Belanja Hibah secara akrual sebesar Rp1.302.956.172.580 sama dengan belanja Hibah secara kas (LRA) terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	9.709.000.000
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.293.247.172.580
Total	1.302.956.172.580

7. Belanja Bantuan Sosial secara akrual Rp92.136.072.115.501 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	578.447.093.673
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	33.450.874.872.829
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	41.650.296.591.168
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	3.405.734.443.337
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.162.255.120.813
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	1.888.463.993.681
Total	92.136.072.115.501

8. Belanja Lain-lain secara akrual sebesar Rp3.303.431.628.330 terdiri dari :

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	947.804.000.000
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	51.034.500.000
Belanja Lain-lain BUN	375.393.611.334
Belanja Lain-lain Lainnya	1.929.199.516.996
Total	3.303.431.628.330

9. Penyusutan secara akrual sebesar Rp65.593.511.804.691.
10. Penyisihan piutang secara akrual sebesar Rp22.741.731.370.899.

II. Transfer ke Daerah

Total Transfer ke Daerah berbasis akrual adalah sebesar Rp529.970.629.510.539 yang bersumber dari:

1. Transfer Dana Perimbangan secara akrual sebesar Rp447.165.900.578.832 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Transfer Dana Bagi Hasil	105.274.230.537.032
Transfer Dana Alokasi Umum	311.139.289.165.000
Transfer Dana Alokasi Khusus	30.752.380.876.800
Total	447.165.900.578.832

2. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian secara akrual sebesar Rp82.804.728.931.707 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Transfer Dana Otonomi Khusus	13.445.571.566.000
Transfer Dana Penyesuaian	69.359.157.365.707
Total	82.804.728.931.707

Rincian lengkap informasi belanja secara akrual disajikan pada **Lampiran 2**.

III. PENJELASAN INFORMASI AKRUAL

A. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh Pemerintah karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan yang masih harus diterima timbul karena imbalan atas pelayanan/fasilitas yang telah diberikan pemerintah kepada pihak lain belum diterima. Pada tahun anggaran 2013, pendapatan yang masih harus diterima Pemerintah berjumlah Rp61.651.346.080.258 yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp42.858.185.051.723 dan sisanya, yaitu sebesar Rp18.793.161.028.535 bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Informasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2
Informasi Pendapatan yang Masih harus Diterima

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Perpajakan	42.858.185.051.723
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	42.391.051.901.659
Pendapatan PPh	10.038.145.181.262
Pendapatan PPN dan PPnBM	6.523.540.290.017
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	5.291.694.919.525
Pendapatan Cukai	19.291.039.572.307
Pendapatan Pajak Lainnya	1.246.631.938.548
Pajak Perdagangan Internasional	467.133.150.064
Pendapatan Bea Masuk	423.430.620.135
Pendapatan Bea Keluar	43.702.529.929
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.793.161.028.535
Penerimaan Sumber Daya Alam	16.644.990.000.000
Pendapatan Minyak Bumi	7.145.190.000.000
Pendapatan Gas Bumi	9.499.800.000.000
Pendapatan PNBP Lainnya	2.075.417.387.560
Pendapatan Penjualan dan Sewa	106.190.129.782

Pendapatan Jasa	75.772.084.428
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	128.476.300
Pendapatan Pendidikan	97.043.500.800
Pendapatan Iuran dan Denda	92.896.081.013
Pendapatan Lain-lain	1.703.387.115.237
Pendapatan Badan Layanan Umum	72.753.640.975
Pendapatan Jasa Layanan Umum	69.582.000.326
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2.992.840.268
Pendapatan BLU Lainnya	178.800.381
Total	61.651.346.080.258

Daftar rincian K/L yang melaporkan pendapatan yang masih harus diterima disajikan dalam **Lampiran 3**.

B. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Pemerintah, atau terdapat kelebihan bayar pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara.

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan jasa/fasilitas/pelayanan tersebut. Pendapatan diterima di muka juga dapat terjadi apabila wajib pajak telah menyetorkan kewajiban pajak yang tidak hanya untuk kewajiban pajak periode berjalan tetapi juga untuk kewajiban periode berikutnya. Pada TA 2012 pendapatan yang diterima di muka berjumlah Rp35.646.647.702.354 yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp23.101.440.433.394 dan PNPB sebesar Rp12.545.207.268.960. Informasi Pendapatan diterima di Muka disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3
Informasi Pendapatan Diterima Di Muka

Uraian	Jumlah (Rp)
Penerimaan Perpajakan	23.101.440.433.394
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	22.800.992.894.894
Pendapatan PPh	2.056.337.534.489
Pendapatan PPN dan PPnBM	2.488.183.910.900
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	1.785.600.200.731
Pendapatan Cukai	16.376.534.351.810
Pendapatan Pajak Lainnya	94.336.896.964
Pajak Perdagangan Internasional	300.447.538.500
Pendapatan Bea Masuk	237.827.313.744
Pendapatan Bea Keluar	62.620.224.756
Penerimaan Negara Bukan Pajak	12.545.207.268.960
Pendapatan PNPB Lainnya	12.256.758.011.376
Pendapatan Penjualan dan Sewa	17.148.980.357
Pendapatan Jasa	137.646.135.436
Pendapatan Bunga	11.972.619.111.000
Pendapatan Pendidikan	127.942.124.866
Pendapatan Iuran dan Denda	230.961.563
Pendapatan Lain-Lain	1.170.698.154
Pendapatan Badan Layanan Umum	288.449.257.584
Pendapatan Jasa Layanan Umum	283.199.320.229
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	5.209.657.903
Pendapatan BLU Lainnya	40.279.452
Total	35.646.647.702.354

Daftar rincian K/L yang melaporkan pendapatan yang diterima di muka dan pendapatan yang harus diterima tahun lalu yang diterima pada TA 2011 disajikan pada **Lampiran 4**.

C. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/ perjanjian/komitmen tersebut. Pada tahun anggaran 2013, belanja yang masih harus dibayar tercatat sebesar Rp85.152.687.622.603 rincian pada Tabel 4.

Tabel 4
Belanja yang Masih Harus Dibayar

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pemerintah Pusat	67.901.002.413.315
Belanja Pegawai	1.265.639.008.264
Belanja Gaji dan Tunjangan	1.229.544.388.055
Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	35.838.906.381
Belanja Kontribusi Sosial	255.713.828
Belanja Barang	1.221.436.737.935
Belanja Barang	24.691.017.332
Belanja Jasa	216.785.190.936
Belanja Pemeliharaan	1.417.082.113
Belanja Perjalanan	4.164.283.100
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	974.379.164.454
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	39.011.672.886.188
Belanja Pembayaran Bunga Utang	27.712.241.312.992
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	11.298.923.801.000
Belanja Denda	507.772.196
Belanja Subsidi	26.363.997.214.868
Belanja Subsidi Perusahaan Negara	26.363.997.214.868
Belanja Lain-Lain	38.256.566.060
Belanja lain-lain	38.256.566.060
Transfer ke Daerah	17.251.685.209.288
Dana Bagi Hasil	17.251.685.209.288
Transfer DBH PBB untuk Propinsi/Kabupaten/Kota	118.726.342.393
Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi/Kabupaten/Kota	6.061.381.808
Transfer DBH Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	12.965.883.103.111
Transfer DBH Pertambangan Umum	3.512.853.890.929
Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi	251.514.582.221
Transfer DBH Kehutanan	365.484.538.825
Transfer DBH Perikanan	31.161.370.000
Total	85.152.687.622.603

Daftar rincian K/L yang melaporkan Belanja yang Masih Harus Dibayar disajikan dalam **Lampiran 5**.

D. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Pemerintah. Pada TA 2012, belanja dibayar di muka tercatat sebesar Rp966.376.835.459 dengan rincian sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5
Belanja Dibayar di Muka

Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Pemerintah Pusat	424.877.966.073
Belanja Pegawai	83.488.907.900
Belanja Gaji dan Tunjangan	38.217.156.193
Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	45.271.751.707
Belanja Barang	239.082.928.506
Belanja Barang	67.449.764.004
Belanja Jasa	108.997.075.880
Belanja Pemeliharaan	60.276.452
Belanja Perjalanan	1.879.958.860
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	60.695.853.310
Belanja Lain-Lain	102.306.129.667
Belanja Lain-lain	102.306.129.667
Transfer ke Daerah	541.498.869.386
Dana Bagi Hasil	440.514.792.439
Transfer DBH PPh Psl 21	80.513.789.668
Transfer DBH PPh Psl 25/29	103.331.323.534
Transfer DBH PBB untuk Propinsi/Kabupaten/Kota	86.790.473.647
Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi/Kabupaten/Kota	2.985.720.175
Transfer DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan ke Kabupaten/Kota	72.469.913.314
Transfer DBH Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	26.719.698.578
Transfer DBH Pertambangan Umum	30.361.788.635
Transfer DBH Pertambangan Panas Bumi	1.732.551.362
Transfer DBH Kehutanan	14.461.484.266
Transfer DBH Cukai Hasil Tembakau	21.148.049.260
Dana Penyesuaian	100.984.076.947
Transfer Dana Bantuan Operasional Sekolah	39.849.930.500
Transfer Dana Keistimewaan Yogyakarta	61.134.146.447
Total	966.376.835.459

Daftar rincian Kementerian Negara/lembaga yang melaporkan Belanja Dibayar di Muka disajikan pada Lampiran 6.



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

**INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
TAHUN ANGGARAN 2013**

(dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI MENURUT BASIS KAS *)	PENYESUAIAN AKRUAL		REALISASI MENURUT BASIS AKRUAL
		TAMBAH	KURANG	
A. Pendapatan Negara dan Hibah				
I. Penerimaan Perpajakan	1.077.309.220.752.239	42.858.185.051.723	23.101.440.433.394	1.097.065.965.370.568
1. Pajak Dalam Negeri	1.029.850.272.828.329	42.391.051.901.659	22.800.992.894.894	1.049.440.331.835.094
2. Pajak Perdagangan Internasional	47.458.947.923.910	467.133.150.064	300.447.538.500	47.625.633.535.474
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	353.811.044.719.131	18.793.161.028.535	12.545.207.268.960	360.058.998.478.706
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	226.356.940.915.643	16.644.990.000.000	-	243.001.930.915.643
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	34.025.604.050.283	-	-	34.025.604.050.283
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	68.779.953.825.624	2.075.417.387.560	12.256.758.011.376	58.598.613.201.808
4. Pendapatan BLU	24.648.545.927.581	72.753.640.975	288.449.257.584	24.432.850.310.972
III. Penerimaan Hibah	6.855.323.282.297	-	-	6.855.323.282.297
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II+A.III)	1.437.975.588.753.667	61.651.346.080.258	35.646.647.702.354	1.463.980.287.131.571
B. Belanja Negara				
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.137.162.887.298.240	156.236.245.588.905	424.877.966.073	1.292.974.254.921.072
1. Belanja Pegawai	221.688.819.162.644	1.265.639.008.264	83.488.907.900	222.870.969.263.008
2. Belanja Barang	169.722.685.080.370	1.221.436.737.935	239.082.928.506	170.705.038.889.799
3. Belanja Modal	180.864.203.133.334	-	-	180.864.203.133.334
4. Pembayaran Bunga Utang	113.035.490.483.582	39.011.672.886.188	-	152.047.163.369.770
5. Subsidi	355.045.179.958.292	26.363.997.214.868	-	381.409.177.173.160
6. Belanja Hibah	1.302.956.172.580	-	-	1.302.956.172.580
7. Bantuan Sosial	92.136.072.115.501	-	-	92.136.072.115.501
8. Belanja Lain-lain	3.367.481.191.937	38.256.566.060	102.306.129.667	3.303.431.628.330
9. Penyusutan	-	65.593.511.804.691	-	65.593.511.804.691
10. Penyisihan Piutang	-	22.741.731.370.899	-	22.741.731.370.899
II. Transfer ke Daerah	513.260.443.170.637	17.251.685.209.288	541.498.869.386	529.970.629.510.539
1. Dana Perimbangan	430.354.730.161.983	17.251.685.209.288	440.514.792.439	447.165.900.578.832
a. Dana Bagi Hasil	88.463.060.120.183	17.251.685.209.288	440.514.792.439	105.274.230.537.032
b. Dana Alokasi Umum	311.139.289.165.000	-	-	311.139.289.165.000
c. Dana Alokasi Khusus	30.752.380.876.800	-	-	30.752.380.876.800
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	82.905.713.008.654	-	100.984.076.947	82.804.728.931.707
a. Dana Otonomi Khusus	13.445.571.566.000	-	-	13.445.571.566.000
b. Dana Penyesuaian	69.460.141.442.654	-	100.984.076.947	69.359.157.365.707
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1.650.423.330.468.877	173.487.930.798.193	966.376.835.459	1.822.944.884.431.611

*) Realisasi Pendapatan Menurut Basis Kas Berdasarkan Realisasi Pendapatan yang Dilaporkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga (LKKL)

**INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.437.975.588.753.667	61.651.346.080.258	35.646.647.702.354	1.463.980.287.131.571
41	Penerimaan Perpajakan	1.077.309.220.752.239	42.858.185.051.723	23.101.440.433.394	1.097.065.965.370.568
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.029.850.272.828.329	42.391.051.901.659	22.800.992.894.894	1.049.440.331.835.094
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	506.438.040.026.934	10.038.145.181.262	2.056.337.534.489	514.419.847.673.707
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	88.747.358.720.504	-	-	88.747.358.720.504
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	32.363.211.342.144	-	-	32.363.211.342.144
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	56.384.134.954.760	-	-	56.384.134.954.760
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	12.423.600	-	-	12.423.600
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	413.803.638.117.483	10.038.145.181.262	2.056.337.534.489	421.785.445.764.256
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	90.162.951.916.322	363.036.330.487	127.038.297.618	90.398.949.949.191
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	6.837.151.963.713	26.144.174.265	2.431.647.380	6.860.864.490.598
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	36.331.285.893.863	-	-	36.331.285.893.863
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	22.205.806.152.234	522.465.418.350	281.782.707.867	22.446.488.862.717
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	4.383.378.397.033	320.824.599.568	63.053.468.112	4.641.149.528.489
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	154.291.540.740.854	7.351.601.266.231	1.092.237.717.157	160.550.904.289.928
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	27.984.775.522.032	1.036.571.515.136	313.095.980.221	28.708.251.056.947
411128	Pendapatan PPh Final	71.569.830.283.896	417.501.877.225	176.697.716.134	71.810.634.444.987
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	36.917.247.536	-	-	36.917.247.536
41113	Pendapatan PPh Fiskal	849.766.010	-	-	849.766.010
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	849.766.010	-	-	849.766.010
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah	3.886.193.422.937	-	-	3.886.193.422.937
411141	Pendapatan PPh ps1 21 ditanggung Pemerintah	699.355.937	-	-	699.355.937
411142	Pendapatan PPh ps1 22 ditanggung Pemerintah	-	-	-	-
411143	Pendapatan PPh ps1 22 Import ditanggung Pemerintah	(5.933.000)	-	-	(5.933.000)
411144	Pendapatan PPh ps1 23 ditanggung Pemerintah	-	-	-	-
411146	Pendapatan PPh ps1 25/29 ditanggung Pemerintah	770.600.000.000	-	-	770.600.000.000
411147	Pendapatan PPh ps1 26 ditanggung Pemerintah	3.114.900.000.000	-	-	3.114.900.000.000
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah	-	-	-	-
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	384.718.044.298.338	6.523.540.290.017	2.488.183.910.900	388.753.400.677.455
41121	Pendapatan PPN	365.886.622.403.493	6.256.289.329.567	2.458.962.455.782	369.683.949.277.278
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	226.764.754.254.291	6.256.289.329.567	2.458.962.455.782	230.562.081.128.076
411212	Pendapatan PPN Impor	138.990.408.006.556	-	-	138.990.408.006.556
411219	Pendapatan PPN Lainnya	131.460.142.646	-	-	131.460.142.646
41122	Pendapatan PPNBM	18.831.421.894.845	267.250.960.450	29.221.455.118	19.069.451.400.177
411221	Pendapatan PPNBM Dalam Negeri	11.548.275.629.302	267.250.960.450	29.221.455.118	11.786.305.134.634
411222	Pendapatan PPNBM Impor	7.281.335.893.452	-	-	7.281.335.893.452
411229	Pendapatan PPNBM Lainnya	1.810.372.091	-	-	1.810.372.091
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.304.946.252.673	5.291.694.919.525	1.785.600.200.731	28.811.040.971.467
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.304.946.252.673	5.291.694.919.525	1.785.600.200.731	28.811.040.971.467
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	750.408.995.525	386.951.121.259	265.529.303.218	871.830.813.566
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	1.366.302.775.280	709.493.216.925	575.209.747.696	1.500.586.244.509
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.323.232.179.444	214.256.333.036	390.266.612.189	1.147.221.900.291
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	293.834.940.779	66.044.884.080	170.458.248.946	189.421.575.913
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	630.506.809.334	3.914.949.364.225	384.136.288.682	4.161.319.884.877
411316	Pendapatan PBB Migas	20.940.660.552.311	-	-	20.940.660.552.311
4114	Pendapatan BPHTB	-	-	-	-
41141	Pendapatan BPHTB	-	-	-	-
411411	Pendapatan BPHTB	-	-	-	-
4115	Pendapatan Cukai	108.452.161.927.559	19.291.039.572.307	16.376.534.351.810	111.366.667.148.056
41151	Pendapatan Cukai	108.452.161.927.559	19.291.039.572.307	16.376.534.351.810	111.366.667.148.056
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	103.561.603.432.563	19.289.611.363.590	16.368.814.306.980	106.482.400.489.173
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	156.947.706.365	-	104.000.000	156.843.706.365
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	4.689.702.272.470	55.800.000	6.680.468.500	4.683.077.603.970
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	32.109.498.392	1.150.260.730	761.380.377	32.498.378.745
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	11.799.017.769	222.147.987	174.195.953	11.846.969.803
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	4.937.080.322.825	1.246.631.938.548	94.336.896.964	6.089.375.364.409
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	4.615.962.588.612	-	-	4.615.962.588.612
411611	Pendapatan Bea Meterai	1.204.894.943.137	-	-	1.204.894.943.137
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	3.064.691.858.120	-	-	3.064.691.858.120
411613	Pendapatan PPh Batubara	345.029.515.313	-	-	345.029.515.313
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.346.272.042	-	-	1.346.272.042
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	321.117.734.213	1.246.631.938.548	94.336.896.964	1.473.412.775.797
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	119.031.058.987	1.246.631.938.548	94.336.896.964	1.271.326.100.571
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	198.018.393.454	-	-	198.018.393.454
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM	3.988.555.918	-	-	3.988.555.918
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	79.725.854	-	-	79.725.854

INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-
412	Pajak Perdagangan Internasional	47.458.947.923.910	467.133.150.064	300.447.538.500	47.625.633.535.474
4121	Pendapatan Bea Masuk	31.620.916.444.853	423.430.620.135	237.827.313.744	31.806.519.751.244
41211	Pendapatan Bea Masuk	31.620.916.444.853	423.430.620.135	237.827.313.744	31.806.519.751.244
412111	Pendapatan Bea Masuk	29.562.998.904.939	333.816.362.625	181.481.336.202	29.715.333.931.362
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	44.573.144	-	-	44.573.144
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	685.227.721.926	83.395.920.097	49.674.221.069	718.949.420.954
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	1.146.963.098.167	109.450.348	3.384.509.088	1.143.688.039.427
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)	-	-	-	-
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT)	191.572.181.000	-	-	191.572.181.000
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	34.109.965.677	6.108.887.065	3.287.247.385	36.931.605.357
4122	Pendapatan Bea Keluar	15.838.031.479.057	43.702.529.929	62.620.224.756	15.819.113.784.230
41221	Pendapatan Bea Keluar	15.838.031.479.057	43.702.529.929	62.620.224.756	15.819.113.784.230
412211	Pendapatan Bea Keluar	15.821.943.886.259	40.480.182.870	62.507.149.044	15.799.916.920.085
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	11.433.418.176	3.156.605.939	77.155.632	14.512.868.483
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	4.654.174.622	65.741.120	35.920.080	4.683.995.662
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	353.811.044.719.131	18.793.161.028.535	12.545.207.268.960	360.058.998.478.706
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	226.356.940.915.643	16.644.990.000.000	-	243.001.930.915.643
4211	Pendapatan Minyak Bumi	136.013.404.082.382	7.145.190.000.000	-	143.158.594.082.382
421111	Pendapatan Minyak Bumi	136.013.404.082.382	7.145.190.000.000	-	143.158.594.082.382
4212	Pendapatan Gas Bumi	67.616.015.965.201	9.499.800.000.000	-	77.115.815.965.201
421211	Pendapatan Gas Bumi	67.616.015.965.201	9.499.800.000.000	-	77.115.815.965.201
4213	Pendapatan Pertambangan Umum	18.571.870.617.886	-	-	18.571.870.617.886
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	447.044.915.577	-	-	447.044.915.577
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	18.124.825.702.309	-	-	18.124.825.702.309
4214	Pendapatan Kehutanan	3.060.553.275.498	-	-	3.060.553.275.498
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.669.208.656.798	-	-	1.669.208.656.798
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.669.208.656.798	-	-	1.669.208.656.798
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	697.951.892.608	-	-	697.951.892.608
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	697.951.892.608	-	-	697.951.892.608
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	105.428.364.304	-	-	105.428.364.304
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	1.493.329.129	-	-	1.493.329.129
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-	-	-	-
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-	-	-	-
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	103.935.035.175	-	-	103.935.035.175
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	587.964.361.788	-	-	587.964.361.788
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	587.964.361.788	-	-	587.964.361.788
4215	Pendapatan Perikanan	228.207.036.120	-	-	228.207.036.120
42151	Pendapatan Perikanan	228.207.036.120	-	-	228.207.036.120
421511	Pendapatan Perikanan	228.207.036.120	-	-	228.207.036.120
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	866.889.938.556	-	-	866.889.938.556
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	866.889.938.556	-	-	866.889.938.556
421611	Pendapatan Seloran Bagian Pertambangan Panas Bumi	857.092.450.519	-	-	857.092.450.519
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	9.797.488.037	-	-	9.797.488.037
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalty Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	34.025.604.050.283	-	-	34.025.604.050.283
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	34.025.604.050.283	-	-	34.025.604.050.283
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	7.490.907.289.021	-	-	7.490.907.289.021
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	7.490.907.289.021	-	-	7.490.907.289.021
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	26.534.696.761.262	-	-	26.534.696.761.262
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	26.534.696.761.262	-	-	26.534.696.761.262

**INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
423	Pendapatan PNPB Lainnya	68.779.953.825.624	2.075.417.387.560	12.256.758.011.376	58.598.613.201.808
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	24.292.839.356.912	106.190.129.782	17.148.980.357	24.381.880.506.337
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	10.340.539.270.293	1.347.000	46.777.500	10.340.493.839.793
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	14.961.189.432	-	-	14.961.189.432
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	30.322.352.973	-	-	30.322.352.973
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	9.782.798.227.778	-	-	9.782.798.227.778
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	147.675.969.747	-	-	147.675.969.747
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	16.014.800	-	-	16.014.800
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	41.673.644.852	1.347.000	46.777.500	41.628.214.352
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	44.905.480	-	-	44.905.480
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	312.265.380.440	-	-	312.265.380.440
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	10.781.584.791	-	-	10.781.584.791
42312	Pendapatan Penjualan Aset	170.055.565.224	6.310.304.352	6.550.000	176.359.319.576
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.216.717.314	-	3.650.000	1.213.067.314
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.772.500.594	-	-	5.772.500.594
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	16.778.935.295	-	-	16.778.935.295
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina	31.150.040.200	-	-	31.150.040.200
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	1.211.859.000	-	-	1.211.859.000
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	805.000	-	-	805.000
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	113.924.707.821	6.310.304.352	2.900.000	120.232.112.173
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	13.461.761.829.552	81.500.000.000	-	13.543.261.829.552
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	3.654.600	-	-	3.654.600
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	12.941.089.775.472	54.630.000.000	-	12.995.719.775.472
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	26.870.000.000	-	26.870.000.000
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	520.668.399.480	-	-	520.668.399.480
42314	Pendapatan Sewa	249.251.830.843	18.378.478.430	17.095.652.857	250.534.656.416
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	184.191.907.816	18.060.874.508	10.491.269.635	191.761.512.689
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin	27.441.257.912	317.393.922	6.502.952.469	21.255.699.365
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan	492.118.838	-	-	492.118.838
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.763.478.526	-	-	2.763.478.526
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.653.377	-	-	35.653.377
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)	930.000	-	-	930.000
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)	-	-	-	-
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	34.326.484.374	210.000	101.430.753	34.225.263.621
42315	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	71.230.861.000	-	-	71.230.861.000
423151	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	41.130.589.960	-	-	41.130.589.960
423152	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	30.100.271.040	-	-	30.100.271.040
4232	Pendapatan Jasa	27.441.550.659.314	75.772.084.428	137.646.135.436	27.379.676.608.306
42321	Pendapatan Jasa I	18.912.638.538.021	37.242.414.975	75.857.844.122	18.874.023.108.874
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	15.999.044.750	5.326.092.290	5.326.092.290	15.999.044.750
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	24.262.127.350	34.804.025	-	24.296.931.375
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	2.197.240.767.421	2.830.158.845	3.424.101.792	2.196.646.824.474
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	12.672.264.689.945	-	43.270.551.000	12.628.994.138.945
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	247.782.472.874	-	-	247.782.472.874

INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	696.759.642.825	26.859.307.328	20.259.160.950	703.359.789.203
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	66.226.664.703	-	-	66.226.664.703
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	1.165.546.687.943	2.218.679	6.077.440	1.165.542.829.182
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.826.556.440.210	2.189.833.808	3.571.860.650	1.825.174.413.368
42322	Pendapatan Jasa II	1.211.992.114.137	360.900.432	37.038.214	1.212.315.976.355
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	178.080.933.040	360.900.432	37.038.214	178.404.795.258
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	756.908.885.956	-	-	756.908.885.956
423223	Pendapatan luran Lelang Untuk Fakir Miskin	-	-	-	-
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil	-	-	-	-
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	1.202.646.865	-	-	1.202.646.865
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan	2.500.000	-	-	2.500.000
423227	Pendapatan Bea Lelang	211.983.754.449	-	-	211.983.754.449
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	57.983.206.208	-	-	57.983.206.208
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	5.830.187.619	-	-	5.830.187.619
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	563.100.733.160	-	-	563.100.733.160
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	372.926.552.657	-	-	372.926.552.657
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	84.746.992.557	-	-	84.746.992.557
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	105.427.187.946	-	-	105.427.187.946
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	31.419.664	6.428.328	-	37.847.992
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	31.419.664	6.428.328	-	37.847.992
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	2.750.967.390.318	-	13.568.710.323	2.737.398.679.995
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	13.568.710.323	-	13.568.710.323	-
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	-	-	-	-
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	126.903.791.564	-	-	126.903.791.564
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	2.610.494.888.431	-	-	2.610.494.888.431
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	3.509.359.250.336	27.483.857.708	47.335.365.000	3.489.507.743.044
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	989.772.793.336	1.984.617.341	9.683.845.000	982.073.565.677
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	975.237.772.000	4.798.968.136	12.917.225.000	967.119.515.136
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	31.844.215.000	4.625.000	2.255.000	31.846.585.000
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	894.063.060.000	663.471.100	12.959.225.000	881.767.306.100
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	587.275.300.000	19.968.702.335	11.453.780.000	595.790.222.335
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator	28.541.785.000	63.473.796	319.035.000	28.286.223.796
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.624.325.000	-	-	2.624.325.000
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	213.053.134.699	-	-	213.053.134.699
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	213.053.134.699	-	-	213.053.134.699
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	131.406.692.201	4.851.025.315	720.715.000	135.537.002.516
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Negeri	53.655.685.000	4.756.205.315	14.925.000	58.396.965.315
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	64.553.659.125	57.920.000	705.790.000	63.905.789.125
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Laport Diri	11.693.460.000	36.900.000	-	11.730.360.000
423284	Pendapatan Penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card)	6.485.000	-	-	6.485.000
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	1.497.403.076	-	-	1.497.403.076
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	149.001.386.778	5.827.457.670	126.462.777	154.702.381.671
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	100.706.755.356	5.827.457.670	126.462.777	106.407.750.249
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	8.273.634.432	-	-	8.273.634.432
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	40.020.996.990	-	-	40.020.996.990
4233	Pendapatan Bunga	4.868.852.804.535	-	11.972.619.111.000	(7.103.766.306.465)
42331	Pendapatan Bunga	2.156.576.805.535	-	-	2.156.576.805.535
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi	-	-	-	-
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	-	-	-	-
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.890.250.985.893	-	-	1.890.250.985.893

**INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	-	-	-	-
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	265.836.654.462	-	-	265.836.654.462
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	489.165.180	-	-	489.165.180
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption	260.000.000	-	-	260.000.000
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang	260.000.000	-	-	260.000.000
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.712.015.999.000	-	11.972.619.111.000	(9.260.603.112.000)
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.711.157.959.000	-	-	2.711.157.959.000
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	-	-	-	-
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara	858.040.000	-	11.972.619.111.000	(11.971.761.071.000)
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara	-	-	-	-
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN	-	-	-	-
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	277.627.642.537	128.476.300	-	277.756.118.837
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	277.627.642.537	128.476.300	-	277.756.118.837
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	3.884.028.266	-	-	3.884.028.266
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	458.805.618	-	-	458.805.618
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	2.613.643.543	-	-	2.613.643.543
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	211.343.749.772	128.476.300	-	211.472.226.072
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	23.155.483.151	-	-	23.155.483.151
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	415.000	-	-	415.000
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	-	-	-	-
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	36.171.517.187	-	-	36.171.517.187
4235	Pendapatan Pendidikan	2.287.583.989.468	97.043.500.800	127.942.124.866	2.256.685.365.402
42351	Pendapatan Pendidikan	2.287.583.989.468	97.043.500.800	127.942.124.866	2.256.685.365.402
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	1.764.990.392.677	91.377.279.471	119.736.195.533	1.736.631.476.615
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	65.178.034.285	811.260.000	593.025.000	65.396.269.285
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	66.814.620.357	-	-	66.814.620.357
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	390.600.942.149	4.854.961.329	7.612.904.333	387.842.999.145
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.883.806.348	-	-	278.883.806.348
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	278.883.806.348	-	-	278.883.806.348
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	129.238.510.256	-	-	129.238.510.256
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	1.548.619.812	-	-	1.548.619.812
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	502.539.613	-	-	502.539.613
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	147.196.894.226	-	-	147.196.894.226
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	397.242.441	-	-	397.242.441
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	1.366.624.038.530	92.896.081.013	230.961.563	1.459.289.157.980
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	902.819.616.987	83.917.140.069	-	986.736.757.056
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	722.697.770.022	80.173.887.146	-	802.871.657.168
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	180.121.846.965	3.743.252.923	-	183.865.099.888
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	-	-	-	-
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	136.861.000	-	-	136.861.000
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	136.861.000	-	-	136.861.000
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	130.253.531.810	-	-	130.253.531.810
423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup	6.887.573.334	-	-	6.887.573.334
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	55.788.000	-	-	55.788.000
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)	-	-	-	-

**INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)	-	-	-	-
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	36.048.692.293	-	-	36.048.692.293
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	294.244.624	-	-	294.244.624
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)	-	-	-	-
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan	86.967.233.559	-	-	86.967.233.559
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-
42375	Pendapatan Denda I	333.405.372.430	8.978.940.944	230.961.563	342.153.351.811
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	5.707.554.111	-	-	5.707.554.111
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	304.101.682.339	8.939.174.082	10.798.812	313.030.057.609
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	45.300.000	-	-	45.300.000
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	2.697.118.133	-	-	2.697.118.133
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	15.658.247.840	-	-	15.658.247.840
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	296.348.619	14.913.928	14.626.806	296.635.741
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	-	-	-	-
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional P	948.339	-	-	948.339
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	4.898.173.049	24.852.934	205.535.945	4.717.490.038
42376	Pendapatan Denda II	8.656.303	-	-	8.656.303
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	5.604.539	-	-	5.604.539
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB	3.051.764	-	-	3.051.764
4239	Pendapatan Lain-Lain	7.965.991.527.980	1.703.387.115.237	1.170.698.154	9.668.207.945.063
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	4.972.809.385.665	1.429.825.626.387	490.332.983	6.402.144.679.069
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	184.728.730.415	8.878.853.088	226.241.512	193.381.341.991
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	81.383.170.191	-	-	81.383.170.191
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	3.280.645.392.162	1.420.946.773.299	264.091.471	4.701.328.073.990
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL	13.454.107.170	-	-	13.454.107.170
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	5.335.130.705	-	-	5.335.130.705
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	1.544.403.986	-	-	1.544.403.986
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL	1.405.718.451.036	-	-	1.405.718.451.036
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	-	-	-
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	315.712.609.559	164.701.614.494	194.428.241	480.219.795.812
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	2.350.462.100	-	-	2.350.462.100
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	313.362.147.459	164.701.614.494	194.428.241	477.869.333.712
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.549.123.659	-	-	1.549.123.659
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.549.123.659	-	-	1.549.123.659
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	1.770.265.769.280	-	-	1.770.265.769.280
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening	1.769.395.899.245	-	-	1.769.395.899.245
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Sa	869.870.035	-	-	869.870.035
42399	Pendapatan Lain-Lain	905.654.639.817	108.859.874.356	485.936.930	1.014.028.577.243
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	11.719.592.785	5.610.560	-	11.725.203.345
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	9.629.655.773	-	-	9.629.655.773
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRH)	25.000	-	-	25.000
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah	-	-	-	-
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	-	-	-
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-	-
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi	-	-	-	-

**INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Ielang yang tidak diambil oleh yang berhak	1.901.043.428	-	-	1.901.043.428
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	882.404.322.831	108.854.263.796	485.936.930	990.772.649.697
424	Pendapatan Badan Layanan Umum	24.648.545.927.581	72.753.640.975	288.449.257.584	24.432.850.310.972
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	21.705.385.906.220	69.582.000.326	283.199.320.229	21.491.768.586.317
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	18.360.465.442.899	52.184.008.189	257.302.256.760	18.155.347.194.328
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	6.510.982.723.425	6.382.970.542	852.187.170	6.516.513.506.797
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.286.900.203.251	45.573.543.245	253.001.503.358	9.079.472.243.138
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	186.701.874.799	200.704.402	628.275.108	186.274.304.093
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	900.893.875	-	-	900.893.875
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	-	-	-	-
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.702.062.258.286	-	-	1.702.062.258.286
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	887.702.776	-	-	887.702.776
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	7.355.722.280	-	-	7.355.722.280
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	664.674.064.207	26.790.000	2.820.291.124	661.880.563.083
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan	1.072.243.436.645	223.800.000	198.433.333	1.072.268.803.312
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	932.200.572.897	-	-	932.200.572.897
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	6.393.496.572	-	-	6.393.496.572
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	1.993.747.200	223.800.000	198.433.333	2.019.113.867
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	131.655.619.976	-	-	131.655.619.976
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	2.272.677.026.676	17.174.192.137	25.698.630.136	2.264.152.588.677
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	-	-	-	-
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	-	-	-	-
424133	Pendapatan Program Dana Modal Ventura	3.883.423.283	-	-	3.883.423.283
424134	Pendapatan Program Dana Berqulir Sektoral	559.547.596.187	-	-	559.547.596.187
424135	Pendapatan Program Dana Berqulir Syariah	27.032.263.771	-	-	27.032.263.771
424136	Pendapatan Investasi	688.344.353.174	-	-	688.344.353.174
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	993.869.390.261	17.174.192.137	25.698.630.136	985.344.952.262
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	107.235.864.320	-	-	107.235.864.320
42421	Pendapatan Hibah Terkait	56.250.425.341	-	-	56.250.425.341
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	2.820.043.500	-	-	2.820.043.500
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	35.425.556.079	-	-	35.425.556.079
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	16.288.422.000	-	-	16.288.422.000
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	1.716.403.762	-	-	1.716.403.762
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	-	-	-	-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	50.985.438.979	-	-	50.985.438.979
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	5.673.249.000	-	-	5.673.249.000
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	11.290.040.900	-	-	11.290.040.900
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	17.203.570.000	-	-	17.203.570.000
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	824.223.287	-	-	824.223.287
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	15.994.355.792	-	-	15.994.355.792
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.339.038.388.726	2.992.840.268	5.209.657.903	1.336.821.571.091
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.339.038.388.726	2.992.840.268	5.209.657.903	1.336.821.571.091
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	70.891.881.105	-	-	70.891.881.105
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	1.171.070.729.365	1.857.685.268	1.747.922.903	1.171.180.491.730
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	97.075.778.256	1.135.155.000	3.461.735.000	94.749.198.256
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1.496.885.768.315	178.800.381	40.279.452	1.497.024.289.244
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1.496.885.768.315	178.800.381	40.279.452	1.497.024.289.244
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.496.885.768.315	178.800.381	40.279.452	1.497.024.289.244

**INFORMASI PENDAPATAN SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
43	Penerimaan Hibah	6.855.323.282.297	-	-	6.855.323.282.297
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	6.855.323.282.297	-	-	6.855.323.282.297
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	1.618.817.271.505	-	-	1.618.817.271.505
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	-	-	-
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana Lainnya	-	-	-	-
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	429.880.819.349	-	-	429.880.819.349
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang	416.817.524.706	-	-	416.817.524.706
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa	13.063.294.643	-	-	13.063.294.643
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga	-	-	-	-
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung	1.188.936.452.156	-	-	1.188.936.452.156
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Perorangan	1.694.593.930	-	-	1.694.593.930
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Lembaga/Badan Usaha	125.229.823.031	-	-	125.229.823.031
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Pemerintah Daerah	1.056.935.885.195	-	-	1.056.935.885.195
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Lainnya	5.076.150.000	-	-	5.076.150.000
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	5.236.506.010.792	-	-	5.236.506.010.792
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	1.984.052.348.363	-	-	1.984.052.348.363
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral	832.929.563.429	-	-	832.929.563.429
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral	1.151.021.538.443	-	-	1.151.021.538.443
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Lainnya	101.246.491	-	-	101.246.491
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas	3.252.453.662.429	-	-	3.252.453.662.429
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang	270.939.773.494	-	-	270.939.773.494
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa	1.623.615.058.854	-	-	1.623.615.058.854
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga	-	-	-	-
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung --Langsung Bentuk Uang Perorangan	177.934.000	-	-	177.934.000
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral	314.186.256.486	-	-	314.186.256.486
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral	989.541.117.584	-	-	989.541.117.584
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya	53.993.522.011	-	-	53.993.522.011
	JUMLAH	1.437.975.588.753.667	61.651.346.080.258	35.646.647.702.354	1.463.980.287.131.571

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
51	Belanja Pegawai	221.688.819.162.644	1.265.639.008.264	83.488.907.900	222.870.969.263.008
511	Belanja Gaji dan Tunjangan	111.067.984.414.996	1.229.544.388.055	38.217.156.193	112.259.311.646.858
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	75.184.442.606.967	1.221.593.009.120	22.089.865.696	76.383.945.750.391
51111	Belanja Gaji PNS	41.906.191.191.321	346.654.494.052	6.339.078.467	42.246.506.606.906
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	41.906.195.335.528	346.647.471.895	6.338.430.108	42.246.504.377.315
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	(4.144.207)	7.022.157	648.359	2.229.591
51112	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS	15.610.950.378.277	426.644.865.676	13.311.854.719	16.024.283.389.234
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.163.321.680.400	64.275.871.149	207.872.455	2.227.389.679.094
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	651.092.148.330	55.527.405.077	60.705.050	706.558.848.357
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	864.948.559.216	60.690.309.584	86.844.559	925.552.024.241
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.516.756.832.294	83.903.019.093	6.233.084.741	4.594.426.766.646
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.047.411.951.993	25.948.921.652	2.454.134.862	1.070.906.738.783
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.863.892.151.320	55.957.438.230	593.123.312	1.919.256.466.238
511127	Belanja Tunj. Kemahalan PNS	1.456.606.808	-	1.350.000	1.455.256.808
511128	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS	510.787.656	-	-	510.787.656
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.501.559.660.260	80.341.900.891	3.674.739.740	4.578.226.821.411
51113	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS	221.116.086.181	423.033.625	158.075.000	221.381.044.806
511131	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS	(6.599.450)	-	-	(6.599.450)
511132	Belanja Tunj. Cacat PNS	-	-	-	-
511133	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS	(2.025.000)	-	-	(2.025.000)
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	105.452.187.026	23.059.125	-	105.475.246.151
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	7.201.387.510	325.000	-	7.201.712.510
511136	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swast	-	-	-	-
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	783.895.103	-	-	783.895.103
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	81.726.264.392	399.649.500	158.075.000	81.967.838.892
511139	Belanja Tunjangan SAR PNS	25.960.976.600	-	-	25.960.976.600
51114	Belanja Tunjangan-tunjangan III Pegawai Negeri/Staff di Luar Negeri	2.230.769.999.173	44.040.800	46.343.458	2.230.767.696.515
511141	Belanja Tunj. Sewa Rumah PN (Staff di LN)	179.860.745.511	-	-	179.860.745.511
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PN (Staff di LN)	56.523.187.392	-	-	56.523.187.392
511143	Belanja Tunj. Social Security PN (Staff di LN)	486.649.574	-	-	486.649.574
511144	Belanja Tunj. Asuransi Kecelakaan PN(Staff di LN)	679.111.096	-	-	679.111.096
511145	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PN (Staff di LN)	1.051.824.774.527	-	-	1.051.824.774.527
511146	Belanja Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staff PN (Staff di LN)	53.023.980.716	-	-	53.023.980.716
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PN dalam dan Luar Negeri	210.467.040.657	44.040.800	46.343.458	210.464.737.999
511149	Belanja Lokal Staff Lainnya	677.904.509.700	-	-	677.904.509.700
51115	Belanja Tunjangan Umum PNS	11.132.410.562.430	446.960.606.197	466.160.805	11.578.905.007.822
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	796.369.380.136	35.534.508.419	100.860.805	831.803.027.750
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	7.218.977.866.346	302.919.983.508	-	7.521.897.849.854
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	2.390.119.869.630	40.778.567.714	-	2.430.898.437.344
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	425.386.770.632	27.143.871.113	-	452.530.641.745
511155	Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	157.366.148.606	40.556.675.443	-	197.922.824.049
511156	Belanja Tunjangan Khusus Guru/Dosen	223.200.000	-	-	223.200.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	65.978.129.559	27.000.000	351.500.000	65.653.629.559
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	77.989.197.521	-	13.800.000	77.975.397.521
51116	Belanja Gaji-PNS TNI/POLRI	2.807.456.085.148	-	427.653	2.807.455.657.495
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	2.807.383.939.128	-	427.653	2.807.383.511.475
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/POLRI	72.146.020	-	-	72.146.020
51117	Belanja Tunjangan-tunjangan I PNS TNI/POLRI	1.102.240.740.089	832.511.570	1.767.925.594	1.101.305.326.065
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/POLRI	188.734.635.621	-	-	188.734.635.621
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/POLRI	61.732.698.512	-	-	61.732.698.512
511173	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/POLRI	94.428.585.056	-	-	94.428.585.056
511174	Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/POLRI	18.219.090.039	-	-	18.219.090.039
511175	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/POLRI	51.780.944.658	-	-	51.780.944.658
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/POLRI	192.186.057.391	5.132.198	358.788.845	191.832.400.744
511177	Belanja Tunj. Kemahalan PNS TNI/POLRI	(14.850.000)	-	-	(14.850.000)
511178	Belanja Tunj. Lauk pauk PNS TNI/POLRI	26.625.000	-	-	26.625.000
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/POLRI	495.146.953.812	827.379.372	1.409.136.749	494.565.196.435
51118	Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/POLRI	10.392.063.800	-	-	10.392.063.800
511181	Belanja Tunj. Perbaikan Penghasilan PNS TNI/Polri	-	-	-	-
511182	Belanja Tunj. Cacat PNS TNI/Polri	-	-	-	-
511183	Belanja Tunj. Khusus Peralihan PNS TNI/Polri	-	-	-	-
511184	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS TNI/Polri	-	-	-	-
511185	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS TNI/Polri	-	-	-	-
511186	Belanja Tunj. Kewanitaan PNS TNI/Polri	672.273.800	-	-	672.273.800

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
511187	Belanja Tunj. Guru/Dosen/PNS yang dipekerjakan pada sekolah/PT Swasta PNS TNI/Polri	-	-	-	-
511188	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS TNI/Polri	46.800.000	-	-	46.800.000
511189	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/Polri	9.672.990.000	-	-	9.672.990.000
51119	Belanja Tunjangan-tunjangan III PNS TNI/POLRI	162.915.500.548	33.457.200	-	162.948.957.748
511191	Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	14.866.597.305	-	-	14.866.597.305
511192	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS TNI/POLRI	2.574.001.326	33.457.200	-	2.607.458.526
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	144.154.889.057	-	-	144.154.889.057
511194	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	781.035.000	-	-	781.035.000
511195	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah	318.035.275	-	-	318.035.275
511196	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar dan/atau W	220.942.585	-	-	220.942.585
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	33.855.445.476.023	502.369.951	11.804.406.378	33.844.143.439.596
51121	Belanja Gaji TNI/POLRI	12.198.612.000.150	125.275.235	-	12.198.737.275.385
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	12.197.980.969.015	125.275.235	-	12.198.106.244.250
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	631.031.135	-	-	631.031.135
51122	Belanja Tunjangan-tunjangan I TNI/POLRI	20.322.342.795.986	301.194.916	11.796.406.378	20.310.847.584.524
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.931.771.352.795	-	-	1.931.771.352.795
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	588.202.829.049	-	-	588.202.829.049
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.370.893.070.445	-	-	1.370.893.070.445
511224	Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	48.932.056.398	4.560.000	13.396.250	48.923.220.148
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	711.832.589.682	-	-	711.832.589.682
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	2.461.073.809.676	296.634.916	11.783.010.128	2.449.587.434.464
511227	Belanja Tunj. Kemahalan TNI/POLRI	148.500.255	-	-	148.500.255
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	13.209.488.587.686	-	-	13.209.488.587.686
511229	Belanja Uang Makan TNI/POLRI	-	-	-	-
51123	Belanja Tunjangan-tunjangan II TNI/POLRI	598.560.324.601	14.400.000	-	598.574.724.601
511231	Belanja Tunj. Anggota Cadangan TNI DDA TNI/POLRI	-	-	-	-
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	13.311.769.200	900.000	-	13.312.669.200
511233	Belanja Tunj. BabinkamlibmasTNI/POLRI	62.168.118.208	5.100.000	-	62.173.218.208
511234	Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	169.293.379.831	-	-	169.293.379.831
511235	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	18.757.199.688	8.400.000	-	18.765.599.688
511236	Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	33.239.053.385	-	-	33.239.053.385
511237	Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	58.013.107.600	-	-	58.013.107.600
511238	Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	88.330.708.400	-	-	88.330.708.400
511239	Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah	155.446.988.289	-	-	155.446.988.289
51124	Belanja Tunjangan-tunjangan III TNI/POLRI	735.930.355.286	61.499.800	8.000.000	735.983.855.086
511241	Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	11.273.929.975	-	-	11.273.929.975
511242	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka TNI/POLRI	36.033.573.005	61.499.800	8.000.000	36.087.072.805
511243	Belanja Tunjangan daerah terampil/sangat terampil TNI/Polri	34.800.396.615	-	-	34.800.396.615
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	632.657.576.839	-	-	632.657.576.839
511245	Belanja Santunan Cacat TNI	651.393.600	-	-	651.393.600
511246	Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLR	20.513.485.252	-	-	20.513.485.252
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	696.199.360.592	38.879.968	-	696.238.240.560
51131	Belanja Gaji Pejabat Negara	66.731.573.742	840.000	-	66.732.413.742
511311	Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	66.731.446.072	840.000	-	66.732.286.072
511319	Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	127.670	-	-	127.670
51132	Belanja Tunjangan-tunjangan I Pejabat Negara	142.386.579.999	11.039.968	-	142.397.619.967
511321	Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	4.208.114.400	84.000	-	4.208.198.400
511322	Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	1.026.084.360	25.200	-	1.026.109.560
511323	Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	110.483.055.000	9.200.000	-	110.492.255.000
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	24.730.260.579	1.730.728	-	24.731.991.307
511325	Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	1.939.065.660	40	-	1.939.065.700
51133	Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara	487.081.206.851	27.000.000	-	487.108.206.851
511331	Belanja Tunj. Komunikasi Intensif Pejabat Negara	123.889.113.100	-	-	123.889.113.100
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	263.942.184.373	-	-	263.942.184.373
511333	Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara	17.972.000.000	-	-	17.972.000.000
511334	Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara	68.835.685.372	-	-	68.835.685.372
511335	Belanja Pelayanan Sidang dan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara	382.711.912	-	-	382.711.912
511336	Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara	1.338.868.332	-	-	1.338.868.332
511337	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka Pejabat Negara	7.715.463.612	-	-	7.715.463.612

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
511338	Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Pejabat Negara	3.005.180.150	-	-	3.005.180.150
511341	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	-	27.000.000	-	27.000.000
5114	Belanja Gaji Dokter PTT	1.041.867.532.888	-	-	1.041.867.532.888
51141	Belanja Gaji Dokter PTT	1.041.867.532.888	-	-	1.041.867.532.888
511411	Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT	790.678.149.691	-	-	790.678.149.691
511412	Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT	-	-	-	-
511413	Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT	136.206.134.732	-	-	136.206.134.732
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	-	-	-	-
511414	Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	114.983.248.465	-	-	114.983.248.465
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	290.029.438.526	7.410.129.016	4.322.884.119	293.116.683.423
51151	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	290.029.438.526	7.410.129.016	4.322.884.119	293.116.683.423
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai	159.889.132.459	22.100.863	148.154.562	159.763.078.760
511512	Belanja Tunjangan Pegawai	77.233.373.915	5.136.221.350	3.277.457.886	79.092.137.379
511513	Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	482.764.021	-	24.379	482.739.642
511519	Belanja Tunjangan Lainnya	52.424.168.131	2.251.806.803	897.247.292	53.778.727.642
512	Belanja Honorarium/Lembur/Vakasi/Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	29.149.279.152.124	35.838.906.381	45.271.751.707	29.139.846.306.798
5121	Belanja Honorarium	1.861.438.792.076	246.072.344	-	1.861.684.864.420
51211	Belanja Honorarium	1.861.438.792.076	246.072.344	-	1.861.684.864.420
512111	Belanja Uang Honor Tetap	1.861.438.792.076	246.072.344	-	1.861.684.864.420
512112	Belanja Uang Honor Tidak Tetap	-	-	-	-
5122	Belanja Lembur	659.533.750.843	46.108.900	306.760.032	659.273.099.711
51221	Belanja Lembur	659.533.750.843	46.108.900	306.760.032	659.273.099.711
512211	Belanja uang lembur	659.533.750.843	46.108.900	306.760.032	659.273.099.711
5123	Belanja Vakasi	274.929.984.523	-	-	274.929.984.523
51231	Belanja Vakasi	274.929.984.523	-	-	274.929.984.523
512311	Belanja Vakasi	274.929.984.523	-	-	274.929.984.523
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	26.353.376.624.682	35.546.725.137	44.964.991.675	26.343.958.358.144
51241	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	26.353.376.624.682	35.546.725.137	44.964.991.675	26.343.958.358.144
512411	Belanja pegawai (Tunj. Khusus/kegiatan)	26.344.452.388.895	35.546.725.137	44.964.991.675	26.335.034.122.357
512412	Belanja Pegawai Transito	8.924.235.787	-	-	8.924.235.787
513	Belanja Kontribusi Sosial	81.471.555.595.524	255.713.828	-	81.471.811.309.352
5131	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	78.462.009.589.533	-	-	78.462.009.589.533
51311	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	62.981.549.264.904	-	-	62.981.549.264.904
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	26.223.603.171.155	-	-	26.223.603.171.155
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	34.166.582.028.933	-	-	34.166.582.028.933
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	2.181.247.845.230	-	-	2.181.247.845.230
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	387.674.649.424	-	-	387.674.649.424
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	22.441.570.162	-	-	22.441.570.162
51312	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	11.360.976.343.278	-	-	11.360.976.343.278
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	4.401.680.271.875	-	-	4.401.680.271.875
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	5.057.510.196.015	-	-	5.057.510.196.015
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunj. Khusus & Belanja Pegawai	1.901.785.875.388	-	-	1.901.785.875.388
51313	Belanja Tunjangan Hari Tua	250.960.409.513	-	-	250.960.409.513
513131	Belanja Tunjangan Hari Tua	136.738.460.063	-	-	136.738.460.063
513132	Belanja Tunjangan Hari Tua	114.221.949.450	-	-	114.221.949.450
51314	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP	416.933.239.883	-	-	416.933.239.883
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Eks PNS Dephub pada PT KAI	416.933.239.883	-	-	416.933.239.883
513142	Belanja Tunjangan PKRI/KNIP	-	-	-	-
51315	Belanja Pensiun Veteran dan PKRI/KNIP	3.451.590.331.955	-	-	3.451.590.331.955
513151	Belanja Tunjangan Veteran	2.247.769.566.476	-	-	2.247.769.566.476
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran	22.718.562.227	-	-	22.718.562.227
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP	181.102.203.252	-	-	181.102.203.252
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)	1.000.000.000.000	-	-	1.000.000.000.000
5132	Belanja Asuransi Kesehatan	2.780.143.068.089	255.713.828	-	2.780.398.781.917
51321	Belanja Askes PNS/Pejabat Negara	2.780.143.068.089	255.713.828	-	2.780.398.781.917
513211	Belanja Askes PNS	2.670.060.075.432	255.713.828	-	2.670.315.789.260
513212	Belanja Askes Pejabat Negara	110.082.992.657	-	-	110.082.992.657
51322	Belanja Askes Penerima Pensiun	-	-	-	-
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun	-	-	-	-
51323	Belanja Askes TNI/Kemhan	-	-	-	-
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan	-	-	-	-
51324	Belanja Askes Polri	-	-	-	-
513241	Belanja Askes Polri	-	-	-	-
51325	Belanja Askes Veteran	-	-	-	-

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
513251	Belanja Askes Veteran	-	-	-	-
5133	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	-	-	229.402.937.902
51331	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	-	-	229.402.937.902
513311	Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	229.402.937.902	-	-	229.402.937.902
5134	Belanja Cadangan Perubahan Sharing	-	-	-	-
51341	Belanja Cadangan Perubahan Sharing	-	-	-	-
513411	Belanja Cadangan Perubahan Sharing	-	-	-	-
5135	Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	-	-	-	-
51351	Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	-	-	-	-
513511	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Eks PNS	-	-	-	-
52	Belanja Barang	169.722.685.080.370	1.221.436.737.935	239.082.928.506	170.705.038.889.799
521	Belanja Barang	78.201.579.653.671	24.691.017.332	67.449.764.004	78.158.820.906.999
5211	Belanja Barang Operasional	27.405.891.254.659	24.211.407.689	5.628.882.563	27.424.473.779.785
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.843.358.345.364	9.418.318.489	848.654.757	4.851.928.009.096
521112	Belanja pengadaan bahan makanan	1.786.477.292.663	11.810.607.996	3.287.109.881	1.795.000.790.778
521113	Belanja Penambahan Daya Tahan Tubuh	212.535.461.156	162.972.467	-	212.698.433.623
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	286.639.178.689	187.754.343	375.763.698	286.451.169.334
521115	Belanja Honor Operasional Saluran Kerja	1.988.524.858.031	42.852.000	32.100.000	1.988.535.610.031
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18.288.356.118.756	2.588.902.394	1.085.254.227	18.289.859.766.923
5212	Belanja Barang Non Operasional	50.456.678.134.073	479.609.643	61.820.881.441	50.395.336.862.275
52121	Belanja Barang Non Operasional	50.456.678.134.073	479.609.643	61.820.881.441	50.395.336.862.275
521211	Belanja Bahan	8.991.169.777.318	4.938.200	347.503.977	8.990.827.211.541
521212	Belanja Barang Transito	703.500	-	-	703.500
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11.359.841.367.893	39.017.568	438.475.240	11.359.441.910.221
521214	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/A	911.728.249	-	-	911.728.249
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30.104.754.557.113	435.653.875	61.034.902.224	30.044.155.308.764
5215	Belanja Barang Pengganti Pajak dalam Rangka Hibah MCC	132.633.509	-	-	132.633.509
521511	Belanja Barang Pengganti PPN dalam Rangka Hibah MCC	-	-	-	-
521512	Belanja Barang Pengganti Pph dalam Rangka Hibah MCC	132.633.509	-	-	132.633.509
521513	Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam Rangka Hibah MCC	-	-	-	-
521521	Belanja Barang Pengganti Pajak Pemda dalam Rangka Hibah MCC	-	-	-	-
5216	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah	338.877.631.430	-	-	338.877.631.430
521611	Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah	338.877.631.430	-	-	338.877.631.430
522	Belanja Jasa	22.555.433.240.781	216.785.190.936	108.997.075.880	22.663.221.355.837
5221	Belanja Jasa	21.114.250.880.768	216.785.190.936	108.989.570.934	21.222.046.500.770
522111	Belanja Langganan Listrik	2.949.612.087.436	99.167.890.568	41.016.830.476	3.007.763.147.528
522112	Belanja Langganan Telepon	631.985.670.165	32.509.295.434	7.434.349.801	657.060.615.798
522113	Belanja Langganan Air	402.679.962.138	8.739.963.705	7.198.496.860	404.221.428.983
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	316.535.228.132	42.926.628.616	1.253.673.110	358.208.183.638
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	9.648.977.913	179.240	1.491.368	9.647.665.785
522131	Belanja Jasa Konsultansi	5.382.716.589.897	4.981.575.131	94.771.002	5.387.603.394.026
522141	Belanja Jasa Sewa	2.556.838.287.028	28.394.966.582	51.919.937.317	2.533.313.316.293
522151	Belanja Jasa Profesi	3.396.104.559.305	24.920.760	33.621.000	3.396.095.859.065
522191	Belanja Jasa Lainnya	5.468.129.518.754	39.770.900	36.400.000	5.468.132.889.654
5222	Belanja Jasa untuk Transaksi Non Kas	-	-	7.504.946	(7.504.946)
522211	Belanja Jasa untuk Transaksi Non Kas	-	-	7.504.946	(7.504.946)
5223	Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	1.441.182.360.013	-	-	1.441.182.360.013
522311	Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	1.441.182.360.013	-	-	1.441.182.360.013
523	Belanja Pemeliharaan	13.180.727.198.049	1.417.082.113	60.276.452	13.182.084.003.710
5231	Belanja Pemeliharaan	13.180.727.198.049	1.417.082.113	60.276.452	13.182.084.003.710
52311	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.459.617.994.582	219.945.000	24.757.897	3.459.813.181.685
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.256.254.305.932	219.945.000	24.757.897	3.256.449.493.035
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	203.363.688.650	-	-	203.363.688.650
52312	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.297.088.721.708	12.802.613	35.518.555	6.297.066.005.766
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.097.854.527.024	12.802.613	35.518.555	6.097.831.811.082
523129	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.234.194.684	-	-	199.234.194.684
52313	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.187.123.272.812	-	-	3.187.123.272.812
523131	Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.312.172.580.703	-	-	2.312.172.580.703
523132	Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi	176.753.274.304	-	-	176.753.274.304
523133	Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	698.197.417.805	-	-	698.197.417.805
52319	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	236.897.208.947	1.184.334.500	-	238.081.543.447
523199	Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	236.897.208.947	1.184.334.500	-	238.081.543.447
524	Belanja Perjalanan	26.539.103.676.057	4.164.283.100	1.879.958.860	26.541.388.000.297
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	24.373.891.355.500	4.164.283.100	1.879.958.860	24.376.175.679.740
52411	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	24.373.891.355.500	4.164.283.100	1.879.958.860	24.376.175.679.740
524111	Belanja perjalanan biasa	5.484.653.573.194	3.598.798.100	1.603.821.360	5.486.648.549.934
524112	Belanja perjalanan tetap	101.359.315.352	-	-	101.359.315.352

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	670.674.335.221	660.000	-	670.674.995.221
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.305.277.908.463	396.000.000	-	3.305.673.908.463
524119	Belanja perjalanan lainnya	14.811.926.223.270	168.825.000	276.137.500	14.811.818.910.770
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.165.212.320.557	-	-	2.165.212.320.557
52421	Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.165.212.320.557	-	-	2.165.212.320.557
524211	Belanja Gaji dan Tunjangan	688.921.796.410	-	-	688.921.796.410
524212	Belanja Barang	1.888.067.021	-	-	1.888.067.021
524213	Belanja Jasa	-	-	-	-
524214	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
524215	Belanja Perjalanan	-	-	-	-
524219	Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.474.402.457.126	-	-	1.474.402.457.126
525	Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	16.673.590.501.933	974.379.164.454	60.695.853.310	17.587.273.813.077
5251	Belanja Barang BLU	16.673.590.501.933	974.379.164.454	60.695.853.310	17.587.273.813.077
52511	Belanja Barang dan Jasa BLU	16.673.590.501.933	974.379.164.454	60.695.853.310	17.587.273.813.077
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.767.252.827.611	708.716.253	125.084.112	5.767.836.459.752
525112	Belanja Barang	6.085.303.026.645	944.059.822.491	16.151.281.897	7.013.211.567.239
525113	Belanja Jasa	1.787.797.254.569	3.166.300.290	248.732.700	1.790.714.822.159
525114	Belanja Pemeliharaan	591.928.270.034	130.145.755	1.645.591	592.056.770.198
525115	Belanja Perjalanan	487.575.659.099	8.035.000	-	487.583.694.099
525116	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund	101.181.795.904	-	42.893.598.290	58.288.197.614
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.852.551.668.071	26.306.144.665	1.275.510.720	1.877.582.302.016
526	Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	12.572.250.809.879	-	-	12.572.250.809.879
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda	9.890.303.126.341	-	-	9.890.303.126.341
526111	Belanja Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	33.759.441.263	-	-	33.759.441.263
526112	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.732.379.721.002	-	-	2.732.379.721.002
526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.482.352.183.565	-	-	2.482.352.183.565
526114	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	639.713.795.888	-	-	639.713.795.888
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	4.002.097.984.623	-	-	4.002.097.984.623
5262	Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemda	318.646.498.970	-	-	318.646.498.970
526211	Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk Diserahkan Kepada Pemda	140.238.018.524	-	-	140.238.018.524
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk Diserahkan Kepada Pemda	178.408.480.446	-	-	178.408.480.446
5263	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada	2.363.301.184.568	-	-	2.363.301.184.568
526311	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.363.301.184.568	-	-	2.363.301.184.568
53	Belanja Modal	180.864.203.133.334	-	-	180.864.203.133.334
531	Belanja Modal Tanah	4.634.554.545.099	-	-	4.634.554.545.099
5311	Belanja Modal Tanah	4.567.794.538.363	-	-	4.567.794.538.363
53111	Belanja Modal Tanah	4.567.794.538.363	-	-	4.567.794.538.363
531111	Belanja Modal Tanah	4.108.678.616.919	-	-	4.108.678.616.919
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	272.780.609.972	-	-	272.780.609.972
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	16.212.002.490	-	-	16.212.002.490
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	8.399.856.175	-	-	8.399.856.175
531115	Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	137.814.712.884	-	-	137.814.712.884
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	9.089.273.472	-	-	9.089.273.472
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	14.819.466.451	-	-	14.819.466.451
531121	Belanja Penambahan Nilai Tanah	-	-	-	-
5312	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah	66.760.006.736	-	-	66.760.006.736
531211	Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah	66.760.006.736	-	-	66.760.006.736
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.330.717.773.271	-	-	68.330.717.773.271
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.072.601.604.881	-	-	68.072.601.604.881
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.072.601.604.881	-	-	68.072.601.604.881
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.793.505.078.641	-	-	67.793.505.078.641
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	6.214.243.905	-	-	6.214.243.905
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan	5.411.230.500	-	-	5.411.230.500
532114	Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	1.741.257.500	-	-	1.741.257.500
532115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	12.600.595.724	-	-	12.600.595.724
532116	Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	3.506.484.825	-	-	3.506.484.825
532117	Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	19.371.952.069	-	-	19.371.952.069
532118	Belanja Modal Perjalan Peralatan dan Mesin	4.113.365.443	-	-	4.113.365.443

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	226.137.396.274	-	-	226.137.396.274
5322	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah	258.116.168.390	-	-	258.116.168.390
532211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah	258.116.168.390	-	-	258.116.168.390
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.143.230.323.439	-	-	23.143.230.323.439
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.955.098.625.577	-	-	22.955.098.625.577
53311	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.955.098.625.577	-	-	22.955.098.625.577
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.556.206.328.050	-	-	20.556.206.328.050
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	2.713.765.365	-	-	2.713.765.365
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	20.284.559.450	-	-	20.284.559.450
533114	Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	165.196.000	-	-	165.196.000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	144.416.530.753	-	-	144.416.530.753
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	2.282.357.052	-	-	2.282.357.052
533117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	1.125.013.000	-	-	1.125.013.000
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	6.038.638.592	-	-	6.038.638.592
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	2.221.866.237.315	-	-	2.221.866.237.315
5332	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah	188.131.697.862	-	-	188.131.697.862
533211	Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah	188.131.697.862	-	-	188.131.697.862
534	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.790.109.327.027	-	-	78.790.109.327.027
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.789.534.153.317	-	-	78.789.534.153.317
53411	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	44.943.477.928.813	-	-	44.943.477.928.813
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.660.653.504.926	-	-	43.660.653.504.926
534112	Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	20.438.689.229	-	-	20.438.689.229
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan jembatan	4.842.924.500	-	-	4.842.924.500
534114	Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan	1.557.633.451	-	-	1.557.633.451
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	794.571.534.676	-	-	794.571.534.676
534116	Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan	1.000.305.800	-	-	1.000.305.800
534117	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
534118	Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	1.130.796.100	-	-	1.130.796.100
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	459.282.540.131	-	-	459.282.540.131
53412	Belanja Modal Irigasi	3.378.077.517.436	-	-	3.378.077.517.436
534121	Belanja Modal Irigasi	3.029.458.749.412	-	-	3.029.458.749.412
534122	Belanja Modal Bahan Baku Irigasi	20.918.139.647	-	-	20.918.139.647
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	14.618.214.995	-	-	14.618.214.995
534124	Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi	2.279.746.052	-	-	2.279.746.052
534125	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	6.160.205.740	-	-	6.160.205.740
534126	Belanja Modal Perijinan Irigasi	-	-	-	-
534127	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Irigasi	-	-	-	-
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	17.846.693.918	-	-	17.846.693.918
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	286.795.767.672	-	-	286.795.767.672
53413	Belanja Modal Jaringan	30.467.978.707.068	-	-	30.467.978.707.068
534131	Belanja Modal Jaringan	29.655.192.443.939	-	-	29.655.192.443.939
534132	Belanja Modal Bahan Baku Jaringan	60.909.002.459	-	-	60.909.002.459
534133	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	41.081.209.310	-	-	41.081.209.310
534134	Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan	7.573.580.939	-	-	7.573.580.939
534135	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	323.010.525.100	-	-	323.010.525.100
534136	Belanja Modal Perijinan Jaringan	19.750.000	-	-	19.750.000
534137	Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan	-	-	-	-
534138	Belanja Modal Perjalanan Jaringan	57.700.471.196	-	-	57.700.471.196
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	322.491.724.125	-	-	322.491.724.125
5342	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah	575.173.710	-	-	575.173.710
53421	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah	575.173.710	-	-	575.173.710
534211	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah	575.173.710	-	-	575.173.710
536	Belanja Modal Lainnya	3.820.637.997.486	-	-	3.820.637.997.486

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
5361	Belanja Modal Lainnya	3.815.658.354.689	-	-	3.815.658.354.689
53611	Belanja Modal Lainnya	3.815.658.354.689	-	-	3.815.658.354.689
536111	Belanja Modal Lainnya	3.766.104.497.808	-	-	3.766.104.497.808
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	49.553.856.881	-	-	49.553.856.881
5362	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau	4.979.642.797	-	-	4.979.642.797
53621	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	4.979.642.797	-	-	4.979.642.797
536211	Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	4.979.642.797	-	-	4.979.642.797
537	Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	2.144.953.167.012	-	-	2.144.953.167.012
5371	Belanja Modal BLU	2.144.953.167.012	-	-	2.144.953.167.012
53711	Belanja Modal BLU	2.144.953.167.012	-	-	2.144.953.167.012
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	59.443.432.140	-	-	59.443.432.140
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	995.542.369.127	-	-	995.542.369.127
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	850.896.456.991	-	-	850.896.456.991
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	50.033.924.547	-	-	50.033.924.547
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	189.036.984.207	-	-	189.036.984.207
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	113.035.490.483.582	39.011.672.886.188	-	152.047.163.369.770
541	Belanja Pembayaran Bunga Utang	104.956.630.991.564	27.712.241.312.992	-	132.668.872.304.556
5411	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Pendek	-	-	-	-
541111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara	-	-	-	-
5411111	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Rupiah	-	-	-	-
5411119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan	-	-	-	-
5412	Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang	81.771.062.528.089	24.955.111.278.197	-	106.726.173.806.286
54121	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara	64.334.423.580.468	-	-	64.334.423.580.468
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	64.241.149.932.968	-	-	64.241.149.932.968
5412119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara	93.273.647.500	-	-	93.273.647.500
54122	Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-
541221	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan	-	-	-	-
541229	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban Obligasi Negara lainnya	-	-	-	-
54123	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	110.987.068.915	-	-	110.987.068.915
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	110.987.068.915	-	-	110.987.068.915
54125	Belanja Bunga Obligasi Negara-Valas	17.325.651.878.706	24.955.111.278.197	-	42.280.763.156.903
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Valas	17.273.683.519.575	24.955.111.278.197	-	42.228.794.797.772
541259	Belanja Pembiayaan Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	51.968.359.131	-	-	51.968.359.131
5413	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	8.861.197.134.070	-	-	8.861.197.134.070
54131	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	7.453.925.544.420	-	-	7.453.925.544.420
541311	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	7.386.215.606.920	-	-	7.386.215.606.920
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang	67.709.937.500	-	-	67.709.937.500
54132	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek	-	-	-	-
541321	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek	-	-	-	-
541322	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pendek	-	-	-	-
54134	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Jangka Panjang	1.407.271.589.650	-	-	1.407.271.589.650
541341	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas	1.382.873.600.000	-	-	1.382.873.600.000
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya -Imbalan SBSN Jangka Panjang	24.397.989.650	-	-	24.397.989.650
5414	Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang	14.324.371.329.405	2.757.130.034.795	-	17.081.501.364.200
54141	Belanja Bunga Pinjaman program	3.999.626.884.995	2.757.130.034.795	-	6.756.756.919.790
541411	Belanja Bunga Pinjaman Program	3.785.097.805.284	2.757.130.034.795	-	6.542.227.840.079
5414119	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	214.529.079.711	-	-	214.529.079.711
54142	Belanja Bunga Pinjaman proyek	10.324.598.508.744	-	-	10.324.598.508.744
541421	Belanja Bunga Pinjaman Proyek	8.978.319.382.662	-	-	8.978.319.382.662
541429	Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	1.346.279.126.082	-	-	1.346.279.126.082
54143	Belanja Bunga Obligasi Negara	-	-	-	-
541431	Belanja Bunga Obligasi Negara - Valas	-	-	-	-
541439	Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Obligasi Negara	-	-	-	-
54144	Belanja Bunga Utang LN Melalui Penjualan Kembali Pinjaman	-	-	-	-
541441	Belanja Bunga Utang LN dari Penjualan Kembali Pinjaman Program	-	-	-	-
541442	Belanja Bunga Utang LN dari Penjualan Kembali Pinjaman Proyek	-	-	-	-
541449	Belanja Biaya/kewajiban lainnya - Bunga Utang LN Melalui Penjualan Kembali	-	-	-	-
54145	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara	-	-	-	-
541451	Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara - Valuta Asing	-	-	-	-
541459	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharaan	-	-	-	-
54146	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	145.935.666	-	-	145.935.666
541461	Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	145.935.666	-	-	145.935.666
5415	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri	-	-	-	-

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
54151	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	-	-	-	-
541511	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang - Valas	-	-	-	-
541519	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pa	-	-	-	-
54152	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek	-	-	-	-
541521	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Pendek - Valas	-	-	-	-
541529	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Pe	-	-	-	-
542	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	5.737.047.038.080	11.298.923.801.000	-	17.035.970.839.080
5421	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	5.737.047.038.080	11.298.923.801.000	-	17.035.970.839.080
54211	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam N	1.834.283.768.000	-	-	1.834.283.768.000
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri	1.834.283.768.000	-	-	1.834.283.768.000
542119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendah	-	-	-	-
54212	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri	3.398.366.560.600	11.298.923.801.000	-	14.697.290.361.600
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri	3.398.366.560.600	11.298.923.801.000	-	14.697.290.361.600
542129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara	-	-	-	-
54214	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	504.396.709.480	-	-	504.396.709.480
542141	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	504.396.709.480	-	-	504.396.709.480
543	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri	-	-	-	-
5431	Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri	-	-	-	-
54311	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Ne	-	-	-	-
543111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri	-	-	-	-
543119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Surat Perbendah	-	-	-	-
54312	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri	-	-	-	-
543121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri	-	-	-	-
543129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount Obligasi Negara	-	-	-	-
544	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	722.579.964.500	-	-	722.579.964.500
5441	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri	722.579.964.500	-	-	722.579.964.500
54411	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri	722.579.964.500	-	-	722.579.964.500
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali O	722.579.964.500	-	-	722.579.964.500
545	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam	1.221.688.009.000	-	-	1.221.688.009.000
5451	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam N	1.221.688.009.000	-	-	1.221.688.009.000
54511	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang	873.763.312.000	-	-	873.763.312.000
545111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang	873.763.312.000	-	-	873.763.312.000
545119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Pa	-	-	-	-
54512	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek	-	-	-	-
545121	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek	-	-	-	-
545129	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Pendek	-	-	-	-
54513	Belanja Pembayaran Discount SPN	347.924.697.000	-	-	347.924.697.000
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN	347.924.697.000	-	-	347.924.697.000
546	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar N	-	-	-	-
5461	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar N	-	-	-	-
54611	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang	-	-	-	-
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Panjang - Valas	-	-	-	-
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Pa	-	-	-	-
54612	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek	-	-	-	-
546111	Belanja Pembayaran Discount SBSN - Jangka Pendek - Valas	-	-	-	-
546119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Discount SBSN Jangka Pa	-	-	-	-
547	Belanja Denda	397.544.480.438	507.772.196	-	398.052.252.634
5471	Belanja Pembayaran Denda	397.544.480.438	507.772.196	-	398.052.252.634
54711	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga (SPM-IB Pajak)	397.544.480.438	507.772.196	-	398.052.252.634
547111	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Pajak (SPM-IB Pajak)	397.544.480.438	507.772.196	-	398.052.252.634
547112	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan	-	-	-	-
547113	Belanja Pembayaran Imbalan Bunga Bea dan Cukai (SPM-IB Bea dan Cukai)	-	-	-	-

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
547119	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Bunga Dalam Negeri Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
548	Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	-	-	-
5481	Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	-	-	-
54811	Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	-	-	-
548111	Belanja Pembayaran Biaya atas Penerimaan Hibah	-	-	-	-
55	Belanja Subsidi	355.045.179.958.292	26.363.997.214.868	-	381.409.177.173.160
551	Belanja Subsidi Perusahaan Negara	353.917.454.921.135	26.363.997.214.868	-	380.281.452.136.003
5511	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	-	-	-	-
55111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	-	-	-	-
551111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	-	-	-	-
5512	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – BBM	210.000.000.000.462	18.955.471.802.680	-	228.955.471.803.142
551211	Belanja Subsidi Avgas	-	-	-	-
551212	Belanja Subsidi Avtur	-	-	-	-
551213	Belanja Subsidi Premium	99.564.301.233.567	9.002.572.108.413	-	108.566.873.341.980
551214	Belanja Subsidi Minyak Bakar	-	-	-	-
551215	Belanja Subsidi Minyak Solar	73.200.555.361.351	5.337.277.214.175	-	78.537.832.575.526
551216	Belanja Subsidi Minyak Diesel	-	-	-	-
551217	Belanja Subsidi Minyak Tanah	6.253.111.231.399	781.574.594.702	-	7.034.685.826.101
551218	Belanja Subsidi Elpiji	30.982.032.174.145	3.834.047.885.390	-	34.816.080.059.535
5513	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – Non BBM	142.399.116.116.690	7.408.525.412.188	-	149.807.641.528.878
55131	Belanja Subsidi Non-BBM – Harga/Biaya	138.322.043.935.690	7.408.525.412.188	-	145.730.569.347.878
551311	Belanja Subsidi pangan	20.310.112.418.700	-	-	20.310.112.418.700
551312	Belanja Subsidi listrik	99.979.714.091.867	771.397.714.255	-	100.751.111.806.122
551313	Belanja Subsidi benih	414.368.821.123	-	-	414.368.821.123
551314	Belanja Subsidi obat	-	-	-	-
551315	Belanja Subsidi gula	-	-	-	-
551316	Belanja Subsidi pupuk	17.617.848.604.000	6.637.127.697.933	-	24.254.976.301.933
551317	Belanja Subsidi Perawatan Beras	-	-	-	-
551318	Belanja Subsidi pengawasan pupuk	-	-	-	-
551319	Belanja Subsidi harga/biaya lainnya	-	-	-	-
55132	Belanja Subsidi Non-BBM – Pajak	4.077.072.181.000	-	-	4.077.072.181.000
551321	Belanja Subsidi PPh-DTP	3.885.500.000.000	-	-	3.885.500.000.000
551323	Belanja Subsidi BM-DTP	191.572.181.000	-	-	191.572.181.000
55133	Belanja Subsidi Non-BBM – Lainnya	-	-	-	-
551331	Belanja Subsidi haji	-	-	-	-
551332	Belanja Subsidi kendaraan bermotor	-	-	-	-
551339	Belanja Subsidi lainnya	-	-	-	-
551341	Belanja Subsidi Minyak Goreng	-	-	-	-
5514	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan – PSO	1.518.338.803.983	-	-	1.518.338.803.983
55141	Belanja Subsidi dalam rangka PSO	1.518.338.803.983	-	-	1.518.338.803.983
551411	Belanja Subsidi PT KAI	704.776.617.194	-	-	704.776.617.194
551412	Belanja Subsidi PT PELNI	726.522.639.000	-	-	726.522.639.000
551413	Belanja Subsidi PT Pos Indonesia	-	-	-	-
551414	Belanja Subsidi TVRI	-	-	-	-
551415	Belanja Subsidi BULOG dihapuskan	-	-	-	-
551419	Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	87.039.547.789	-	-	87.039.547.789
552	Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	1.127.725.037.157	-	-	1.127.725.037.157
5521	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.127.725.037.157	-	-	1.127.725.037.157
55211	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	-	-	-	-
552111	Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	-	-	-	-
55212	Belanja Subsidi – Bunga Kredit	1.127.725.037.157	-	-	1.127.725.037.157
552121	Belanja Subsidi Bunga KUT	-	-	-	-
552122	Belanja Subsidi Bunga KOP PIR	-	-	-	-
552123	Belanja Subsidi Bunga KOP	-	-	-	-
552124	Belanja Subsidi Bunga KOP PRIM	-	-	-	-
552125	Belanja Subsidi Bunga KPR	-	-	-	-
552126	Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	173.491.014.278	-	-	173.491.014.278
552127	Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	4.177.033.785	-	-	4.177.033.785
552128	Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	96.680.000.000	-	-	96.680.000.000
552129	Belanja Subsidi Bunga kredit program lainnya	2.617.167.265	-	-	2.617.167.265
552131	Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	824.540.999.688	-	-	824.540.999.688
552132	Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	-	-	-	-
552141	Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	240.968.804	-	-	240.968.804
552142	Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	25.413.241.943	-	-	25.413.241.943
552143	Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	564.611.394	-	-	564.611.394
5522	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan	-	-	-	-
55221	Belanja Subsidi Lembaga Non-Keuangan	-	-	-	-

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
552211	Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan	-	-	-	-
		-	-	-	-
56	Belanja Hibah	1.302.956.172.580	-	-	1.302.956.172.580
561	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	9.709.000.000	-	-	9.709.000.000
5611	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	9.709.000.000	-	-	9.709.000.000
56111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	9.709.000.000	-	-	9.709.000.000
561111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	9.709.000.000	-	-	9.709.000.000
562	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	-	-	-
5621	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	-	-	-
56211	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	-	-	-
562111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	-	-	-	-
563	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.293.247.172.580	-	-	1.293.247.172.580
5631	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.293.247.172.580	-	-	1.293.247.172.580
563111	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	1.293.247.172.580	-	-	1.293.247.172.580
563121	Belanja Hibah Barang Kepada Pemda dari Penerusan Hibah LN	-	-	-	-
563122	Belanja Hibah Jasa Kepada Pemda dari Penerusan Hibah LN	-	-	-	-
563123	Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemda dari Penerusan Hibah LN	-	-	-	-
5641	Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	-
564111	Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri	-	-	-	-
57	Belanja Bantuan sosial	92.136.072.115.501	-	-	92.136.072.115.501
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	578.447.093.673	-	-	578.447.093.673
571111	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	549.310.937.673	-	-	549.310.937.673
571112	Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	29.136.156.000	-	-	29.136.156.000
5721	Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	33.450.874.872.829	-	-	33.450.874.872.829
572111	Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang	25.352.034.623.926	-	-	25.352.034.623.926
572112	Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Barang/Jasa	8.098.840.248.903	-	-	8.098.840.248.903
5731	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	41.650.296.591.168	-	-	41.650.296.591.168
573111	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang	40.268.404.652.782	-	-	40.268.404.652.782
573112	Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang	1.381.891.938.386	-	-	1.381.891.938.386
5741	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	3.405.734.443.337	-	-	3.405.734.443.337
574111	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	3.398.735.116.637	-	-	3.398.735.116.637
574112	Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Barang/J	6.999.326.700	-	-	6.999.326.700
5751	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.162.255.120.813	-	-	11.162.255.120.813
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk	11.098.259.041.958	-	-	11.098.259.041.958
575112	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk	63.996.078.855	-	-	63.996.078.855
5761	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	1.888.463.993.681	-	-	1.888.463.993.681
576111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Ua	1.681.096.447.939	-	-	1.681.096.447.939
576112	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana dalam Bentuk Ba	207.367.545.742	-	-	207.367.545.742
58	Belanja Lain-lain	3.367.481.191.937	38.256.566.060	102.306.129.667	3.303.431.628.330
581	Belanja Lain-lain	3.367.481.191.937	38.256.566.060	102.306.129.667	3.303.431.628.330
5811	Belanja Lain-lain Dana Cadangan	947.804.000.000	-	-	947.804.000.000
581111	Belanja Cadangan Umum	-	-	-	-
581112	Belanja Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	-	-	-	-
581113	Belanja Cadangan Reboisasi	-	-	-	-
581114	Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	-	-	-	-
581115	Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)	947.804.000.000	-	-	947.804.000.000
581116	Belanja Cadangan Resiko Perubahan Asumsi Makro	-	-	-	-
581117	Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	-	-	-	-
581118	Belanja Cadangan Resiko Lifting	-	-	-	-
581119	Belanja Cadangan Lainnya	-	-	-	-
581121	Belanja Cadangan Fiskal Lainnya (Resiko Kenaikan TTL Listrik)	-	-	-	-
581122	Belanja Cadangan Beras Pemerintah	-	-	-	-
581123	Belanja Cadangan Benih Nasional	-	-	-	-
5812	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian	-	-	-	-
581211	Belanja Lain-lain Lembaga Non Kementerian	-	-	-	-
5813	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	51.034.500.000	-	-	51.034.500.000
581311	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	-	-	-	-
581312	Jasa Surveyor	-	-	-	-
581313	Jasa Perbendaharaan	-	-	-	-
581314	Jasa Pelayanan Bank Operasional	-	-	-	-
581315	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	-	-	-	-
581316	Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	51.034.500.000	-	-	51.034.500.000
581319	Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN Lainnya	-	-	-	-
5814	Belanja Lain-lain BUN	375.393.611.334	-	-	375.393.611.334

**INFORMASI BELANJA SECARA AKRUAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013
(dalam rupiah)**

KODE AKUN	URAIAN	REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		INFORMASI AKRUAL
			TAMBAH	KURANG	
581411	Belanja Iuran ke Lembaga Internasional	41.129.077.440	-	-	41.129.077.440
581412	Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	-	-	-	-
581413	Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	-	-	-	-
581414	Belanja Dana Penunjang (PHLN)	-	-	-	-
581415	Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	302.986.425.396	-	-	302.986.425.396
581416	Belanja Penugasan PT SMI	26.640.876.289	-	-	26.640.876.289
581417	Belanja Kompensasi Kenaikan Harga BBM	-	-	-	-
581418	Belanja Konversi BBM ke BGG untuk Transportasi Umum	-	-	-	-
581419	Belanja Lain-lain BUN Lainnya	4.637.232.209	-	-	4.637.232.209
581421	Belanja Karena Rugi Selisih Harga SBN	-	-	-	-
5815	Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	-	-	-	-
581511	Belanja Keperluan Mendesak/tak Terduga	-	-	-	-
581512	Belanja Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
5819	Belanja Lain-lain Lainnya	1.993.249.080.603	38.256.566.060	102.306.129.667	1.929.199.516.996
581911	Belanja Pemilu	-	-	-	-
581919	Belanja Lain-lain	1.993.249.080.603	38.256.566.060	102.306.129.667	1.929.199.516.996
		-	-	-	-
	JUMLAH	1.137.162.887.298.240	156.236.245.588.905	424.877.966.073	1.292.974.254.921.072

INFORMASI PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423141	96.944.356
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423221	53.248
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423752	4.545.766.349
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423922	53.046.296
5	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423221	240.533
6	006	KEJAKSAAN AGUNG	423141	79.562.818
7	006	KEJAKSAAN AGUNG	423922	114.588.627
8	006	KEJAKSAAN AGUNG	423221	84.753.631
9	007	KEPRESIDENAN	423291	5.675.167.670
10	007	KEPRESIDENAN	423911	8.650.069.038
11	007	KEPRESIDENAN	423129	6.310.304.352
12	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423141	1.235.846.392
13	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423221	6.699.434
14	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423511	3.807.062.296
15	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423512	480.500.000
16	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423519	46.750.000
17	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423922	8.484.187
18	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423999	3.175.271.187
19	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	423999	66.771.024.921
20	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	423922	1.349.999.794
21	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411121	363.036.330.487
22	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411122	26.144.174.265
23	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411124	522.465.418.350
24	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411125	320.824.599.568
25	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411126	7.351.601.266.231
26	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411127	1.036.571.515.136
27	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411128	417.501.877.225
28	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411211	6.256.289.329.567
29	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411221	267.250.960.450
30	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411311	386.951.121.259
31	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411312	709.493.216.925
32	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411313	214.256.333.036
33	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411314	66.044.884.080
34	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411315	3.914.949.364.225
35	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411511	19.289.611.363.590
36	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411513	55.800.000
37	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411514	1.150.260.730
38	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411519	222.147.987
39	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411621	1.246.631.938.548
40	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412111	333.816.362.625
41	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412113	83.395.920.097
42	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412114	109.450.348
43	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412119	6.108.887.065
44	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412211	40.480.182.870
45	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412212	3.156.605.939
46	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412213	65.741.120

INFORMASI PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
47	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423141	560.873.748
48	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423216	62.106.432
49	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423221	10.916.843
50	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423752	31.227.914
51	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423756	14.913.928
52	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423759	24.852.934
53	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423911	13.088.700
54	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423913	4.250.000
55	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423991	5.610.560
56	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424113	48.450.000
57	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424139	17.174.192.137
58	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424312	275.000.000
59	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424313	1.135.155.000
60	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424911	50.849.315
61	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	423711	80.173.887.146
62	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	423712	3.743.252.923
63	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423218	2.218.679
64	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423141	885.847.741
65	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423221	45.141.083
66	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423241	6.428.328
67	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423414	128.476.300
68	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423511	87.564.647.175
69	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423512	330.760.000
70	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423519	4.808.211.329
71	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423752	809.562.627
72	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424112	45.573.543.245
73	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424119	26.790.000
74	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424123	223.800.000
75	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424312	1.582.685.268
76	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424911	127.951.066
77	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423141	55.500.000
78	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423211	5.326.092.290
79	025	KEMENTERIAN AGAMA	423141	9.030.660.077
80	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	423141	3.803.429.395
81	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	423216	1.336.822.305
82	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	423913	390.430.728
83	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	423911	97.678.800
84	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	423913	97.902.355
85	054	BADAN PUSAT STATISTIK	423116	982.000
86	054	BADAN PUSAT STATISTIK	423216	79.929.819
87	054	BADAN PUSAT STATISTIK	423221	34.229.164
88	054	BADAN PUSAT STATISTIK	423911	4.174.650
89	054	BADAN PUSAT STATISTIK	423999	3.008.984
90	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	423219	2.189.833.808
91	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	423752	861.390.000
92	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423221	3.287.731

INFORMASI PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
93	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423141	1.572.400.114
94	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423149	210.000
95	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423221	89.816.301
96	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423261	1.984.617.341
97	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423262	4.798.968.136
98	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423263	4.625.000
99	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423264	663.471.100
100	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423265	19.968.702.335
101	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423266	63.473.796
102	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423281	4.756.205.315
103	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423282	57.920.000
104	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423283	36.900.000
105	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423752	2.690.809.992
106	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423911	1.752.900
107	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423913	283.020.897.574
108	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423922	247.568.112
109	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423999	5.405.100
110	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	424111	6.382.970.542
111	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	423221	478.500
112	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	423913	213.691.326
113	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	423141	413.415.333
114	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423116	365.000
115	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423212	34.804.025
116	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423291	33.090.000
117	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423216	2.200.000
118	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423752	417.200
119	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423141	4.000.000
120	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423922	110.000.000
121	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	423216	189.217.848
122	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	423511	5.570.000
123	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	6.541.924.564
124	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	5.999.453.898
125	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423922	80.493.193.676
126	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423999	19.446.957.002
127	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	6.541.924.564
128	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	5.999.453.898
129	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423922	80.493.193.676
130	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423999	19.446.957.002
131	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	423221	448.278
132	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	423911	70.174.500
133	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	423913	10.759.090
134	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	423999	5.639.600
135	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	424113	152.254.402
142	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	423141	121.784.583
143	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	423142	317.393.922
145	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423141	200.609.951

INFORMASI PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
146	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423213	2.830.158.845
147	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423216	106.274.000
148	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423221	47.026
149	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423291	119.200.000
150	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423911	41.914.500
151	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423913	146.936.900
156	999.07	BELANJA SUBSIDI	423922	1.831.540.126
157	999.07	BELANJA SUBSIDI	423913	1.137.061.905.326
158	999.08	BELANJA LAINNYA	423221	84.788.660
159	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	421111	7.145.190.000.000
160	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	421211	9.499.800.000.000
161	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	423132	54.630.000.000
163	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	423133	26.870.000.000
TOTAL				61.651.346.080.258

INFORMASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Tahun Anggaran 2013

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	423141	25.515.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	423141	750.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423141	154.246.597
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423149	59.883.255
5	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423221	58.495
6	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	423922	60.162.037
7	007	KEPRESIDENAN	423141	61.200.000
8	007	KEPRESIDENAN	423142	199.515.648
9	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423141	826.863.934
10	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423221	4.739.588
11	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423511	3.357.976.922
12	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423512	424.675.000
13	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423519	769.400.000
14	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	423922	86.972.704
15	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	423141	830.010.735
16	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	423214	43.270.551.000
17	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411121	127.038.297.618
18	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411122	2.431.647.380
19	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411124	281.782.707.867
20	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411125	63.053.468.112
21	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411126	1.092.237.717.157
22	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411127	313.095.980.221
23	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411128	176.697.716.134
24	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411211	2.458.962.455.782
25	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411221	29.221.455.118
26	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411311	265.529.303.218
27	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411312	575.209.747.696
28	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411313	390.266.612.189
29	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411314	170.458.248.946
30	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411315	384.136.288.682
31	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411511	16.368.814.306.980
32	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411512	104.000.000
33	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411513	6.680.468.500
34	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411514	761.380.377
35	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411519	174.195.953
36	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	411621	94.336.896.964
37	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412111	181.481.336.202
38	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412113	49.674.221.069
39	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412114	3.384.509.088
40	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412119	3.287.247.385
41	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412211	62.507.149.044
42	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412212	77.155.632
43	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	412213	35.920.080
44	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423141	2.385.755.537
45	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423216	1.338.347.260
46	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423221	8.808.807
47	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423251	13.568.710.323
48	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423752	5.845.812
49	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423756	14.626.806
50	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423759	205.535.945

INFORMASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Tahun Anggaran 2013

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
51	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423911	15.841.712
52	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423913	5.052.500
53	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423922	44.863.500
54	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	423999	479.715.470
55	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424113	206.425.000
56	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424139	25.698.630.136
57	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424312	1.222.771.789
58	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424313	3.461.735.000
59	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	424911	15.479.452
60	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	423142	239.816.722
61	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	423142	4.245.750
62	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	424911	24.800.000
63	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	423511	74.095.000
64	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	423519	99.095.000
65	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	424113	421.850.108
66	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	423216	734.886.200
67	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	423141	801.740.126
68	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	423142	1.321.059.935
69	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423141	103.091.969
70	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423216	9.270.000
71	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423218	6.077.440
72	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423141	129.071.714
73	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423999	6.221.460
74	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	423141	298.318.672
75	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	424112	21.070.278.244
76	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423141	247.625.708
77	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423221	541.533
78	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423511	65.504.066.273
79	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423512	157.850.000
80	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423519	6.718.659.333
81	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	423752	4.953.000
82	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424112	231.931.225.114
83	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424119	2.820.291.124
84	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	424123	198.433.333
85	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423141	55.500.000
86	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423211	5.326.092.290
87	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423511	50.117.334.004
88	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	423519	9.750.000
89	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	423141	487.387.135
90	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	423141	319.144.315
91	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	423142	421.065.972
92	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	423142	70.833.333
93	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	423142	4.069.772.019
94	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	423141	262.878.585
95	054	BADAN PUSAT STATISTIK	423141	43.733.333
96	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	423141	2.197.800
97	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	423219	3.571.860.650
98	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	423141	516.880.500
99	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423221	115.381
100	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423141	1.999.488.129

INFORMASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Tahun Anggaran 2013

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
101	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423149	41.547.498
102	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423221	22.629.702
103	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423261	9.683.845.000
104	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423262	12.917.225.000
105	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423263	2.255.000
106	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423264	12.959.225.000
107	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423265	11.453.780.000
108	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423266	319.035.000
109	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423281	14.925.000
110	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423282	705.790.000
111	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	423922	2.430.000
112	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	424111	852.187.170
113	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	424312	525.151.114
114	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	423141	319.210.000
115	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	423142	3.118.862
116	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	423142	3.118.862
117	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423116	46.777.500
118	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423141	4.143.660
119	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	423291	3.362.777
120	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	423141	56.705.250
121	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	423511	110.723.334
122	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	3.459.447.025
123	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	5.478.473.898
124	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	3.459.447.025
125	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	423216	5.478.473.898
126	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	423216	61.009.714
127	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	423121	3.650.000
128	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	423511	572.000.000
129	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	423512	10.500.000
130	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	423519	16.000.000
131	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	423142	1.586.666
132	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	423141	159.400.976
133	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423129	2.900.000
134	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423141	338.021.960
135	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423213	3.424.101.792
136	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423216	239.805.930
137	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423221	144.708
138	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423291	123.100.000
139	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423911	210.399.800
140	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	423913	259.038.971
141	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	423142	35.200.000
142	100	KOMISI YUDISIAL RI	423141	62.388.000
143	104	BNP2TKI	423142	133.618.700
144	999.01	PENGELOLAAN UTANG	423333	11.972.619.111.000
TOTAL				35.646.647.702.354

BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Tahun Anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	511111	669.499.000
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	522111	828.087.150
3	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	532111	52.173.000
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511111	733.542.809
5	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511119	949.883
6	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511121	15.098.710
7	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511122	4.683.198
8	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511123	22.190.000
9	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511124	45.125.000
10	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511125	16.431.027
11	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511126	178.603.612
12	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511129	1.406.480.300
13	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511138	600.000
14	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511151	620.000
15	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	512411	32.848.011.875
16	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	521111	60.426.359
17	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	521114	2.748.365
18	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522111	2.144.994.763
19	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522112	134.604.247
20	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522131	120.815.839
21	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522119	2.222.710
22	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522141	1.007.718.870
23	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	524111	230.386.200
24	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	521119	50.243.000
25	006	KEJAKSAAN AGUNG	511111	10.378.531.198
26	006	KEJAKSAAN AGUNG	511129	1.296.711.442
27	006	KEJAKSAAN AGUNG	521111	2.530.776.488
28	006	KEJAKSAAN AGUNG	521112	321.462.650
29	006	KEJAKSAAN AGUNG	521113	160.982.086
30	005	MAHKAMAH AGUNG	511111	44.267.460
31	005	MAHKAMAH AGUNG	511119	12.617
32	005	MAHKAMAH AGUNG	511121	7.400.594
33	005	MAHKAMAH AGUNG	511122	1.166.558
34	005	MAHKAMAH AGUNG	511124	2.205.490.925
35	005	MAHKAMAH AGUNG	511125	314.232.715
36	005	MAHKAMAH AGUNG	511126	3.300.290
37	005	MAHKAMAH AGUNG	511129	73.417.600
38	005	MAHKAMAH AGUNG	511151	1.750.000
39	005	MAHKAMAH AGUNG	511157	27.000.000
40	005	MAHKAMAH AGUNG	511211	1.153.010
41	005	MAHKAMAH AGUNG	511224	4.560.000
42	005	MAHKAMAH AGUNG	511341	27.000.000
43	005	MAHKAMAH AGUNG	512211	149.900
44	005	MAHKAMAH AGUNG	521111	18.863.000
45	005	MAHKAMAH AGUNG	521114	77.500
46	005	MAHKAMAH AGUNG	521115	1.537.500
47	005	MAHKAMAH AGUNG	521211	4.405.200
48	005	MAHKAMAH AGUNG	521219	116.500
49	005	MAHKAMAH AGUNG	522111	76.968.951
50	005	MAHKAMAH AGUNG	522112	5.197.881

NO	BA	KEMENTERIAN NEGERI/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
51	005	MAHKAMAH AGUNG	522113	9.684.859
52	005	MAHKAMAH AGUNG	522119	2.745.990
53	005	MAHKAMAH AGUNG	522141	25.000.000
54	005	MAHKAMAH AGUNG	522151	21.600.000
55	005	MAHKAMAH AGUNG	533111	12.760.410
56	007	KEPRESIDENAN	511111	1.208.400
57	007	KEPRESIDENAN	511121	120.840
58	007	KEPRESIDENAN	511122	19.672
59	007	KEPRESIDENAN	511125	65.028
60	007	KEPRESIDENAN	511126	22.600
61	007	KEPRESIDENAN	521111	1.356.814.884
62	007	KEPRESIDENAN	522111	92.662.801
63	007	KEPRESIDENAN	522112	7.610.337
64	007	KEPRESIDENAN	522113	59.207.600
65	007	KEPRESIDENAN	522119	53.214.270
66	007	KEPRESIDENAN	522141	64.098.222
67	007	KEPRESIDENAN	525112	1.924.039.725
68	007	KEPRESIDENAN	525119	14.978.374.693
69	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511111	57.441.500
70	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511119	4.521.746
71	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511121	2.258.941
72	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511122	837.696
73	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511123	10.270.206
74	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511124	9.720.000
75	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511125	11.752.820
76	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511126	550.718
77	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	511151	81.360
78	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	522111	20.000
79	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	522112	159.130.410
80	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	522119	8.061.542
81	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511111	714.049.428
82	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511119	1.220.575
83	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511121	17.475.510
84	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511122	5.944.678
85	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511123	7.581.650
86	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511124	94.525.000
87	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511125	16.567.302
88	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511126	29.603.210
89	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511129	923.935.236
90	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511138	900.000
91	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511147	12.464.700
92	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511151	2.348.000
93	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	512211	36.087.000
94	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521111	88.563.313
95	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521114	162.667.730
96	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521119	218.031
97	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521219	49.770.000
98	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522111	3.518.231.768
99	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522112	1.012.798.597
100	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522113	147.585.971
101	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522119	7.593.439
102	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522131	7.530.000
103	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522141	802.669.825
104	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	523111	425.000

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
105	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	523121	30.000
106	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	524111	3.132.625.000
107	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525111	62.856.903
108	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525112	17.967.400
109	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525113	368.540.000
110	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	547111	507.772.196
111	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511111	25.978.531
112	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511119	700
113	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511121	1.691.330
114	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511122	104.888
115	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511123	3.780.000
116	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511124	900.000
117	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511125	495.856
118	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511126	463.760
119	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511129	16.890.000
120		#N/A	521111	8.489.991
121	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	522111	474.164.080
122	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	522112	55.489.919
123		#N/A	522113	29.413.220
124	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	522119	2.149.920
125	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	522131	4.853.229.292
126	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	522151	3.320.760
127	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	522191	3.659.650
128	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511111	14.200.000
129	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511119	375
130	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511121	420.000
131	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511122	103.878
132	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511124	24.760.512
133	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511125	2.191.726
134	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511126	18.080
135	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	511129	88.776.200
136	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	522111	1.314.419.524
137	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	522112	73.268.388
138	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	522113	47.655.110
139	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511111	159.850.510
140	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511119	24.515
141	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511121	5.689.380
142	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511122	1.945.490
143	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511123	1.080.000
144	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511124	2.871.450
145	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511125	1.382.926
146	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511126	25.279.380
147	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511129	706.600.600
148	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511134	23.059.125
149	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511151	960.000
150	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	521111	2.314.500
151	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522111	211.026.065
152	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522112	2.717.740
153	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522113	69.402.959
154	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522141	60.000.000
155	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511111	706.187.056
156	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511119	45.036
157	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511121	24.713.440
158	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511122	7.387.198

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
159	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511123	38.637.454
160	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511124	301.866.754
161	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511125	19.217.913
162	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511126	19.523.473
163	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511129	3.075.938.956
164	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511151	522.506
165	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511153	1.340.943.500
166	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	521111	1.126.936.043
167	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522111	12.195.942.190
168	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522112	459.568.332
169	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522113	796.415.599
170	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522119	139.116.842
171	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522141	198.000.000
172	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	523111	219.520.000
173	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	523121	12.280.000
174	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525111	645.859.350
175	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525112	334.222.032
176	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525113	348.686.261
177	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525114	130.145.755
178	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525115	8.035.000
179	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525119	10.890.556.379
180	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	533115	3.458.825.400
181	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	533111	940.500
182	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	537112	52.280.000
183	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	511111	11.952.060.651
184	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	522119	37.111.605.426
185	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	525112	941.783.593.334
186	025	KEMENTERIAN AGAMA	511111	318.187.599.129
187	025	KEMENTERIAN AGAMA	511121	64.171.224.834
188	025	KEMENTERIAN AGAMA	511122	55.493.775.971
189	025	KEMENTERIAN AGAMA	511123	60.453.704.681
190	025	KEMENTERIAN AGAMA	511124	80.896.199.357
191	025	KEMENTERIAN AGAMA	511125	25.495.375.031
192	025	KEMENTERIAN AGAMA	511126	55.490.958.161
193	025	KEMENTERIAN AGAMA	511129	65.616.499.995
194	025	KEMENTERIAN AGAMA	511151	35.507.875.443
195	025	KEMENTERIAN AGAMA	511152	302.919.983.508
196	025	KEMENTERIAN AGAMA	511153	39.436.964.214
197	025	KEMENTERIAN AGAMA	511154	27.143.871.113
198	025	KEMENTERIAN AGAMA	511155	40.556.675.443
199	025	KEMENTERIAN AGAMA	511519	1.724.723.400
200	025	KEMENTERIAN AGAMA	522111	13.627.599.265
201	025	KEMENTERIAN AGAMA	522112	10.653.940.591
202	025	KEMENTERIAN AGAMA	522113	3.064.133.735
203	025	KEMENTERIAN AGAMA	522119	3.078.318.735
204	025	KEMENTERIAN AGAMA	536111	5.239.135.604
205	025	KEMENTERIAN AGAMA	537111	124.162.047.160
206	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	511111	328.595.000
207	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	511129	12.205.000
208	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	522119	883.544.457
209	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511111	15.442.428
210	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511119	517
211	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511121	687.250
212	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511122	137.344

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
213	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511123	2.880.000
214	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511125	333.447
215	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511126	14.907.482
216	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511129	48.813.000
217	027	KEMENTERIAN SOSIAL	511151	400.000
218	027	KEMENTERIAN SOSIAL	512411	208.096.002
219	027	KEMENTERIAN SOSIAL	521111	310.500
220	027	KEMENTERIAN SOSIAL	522111	91.883.823
221	027	KEMENTERIAN SOSIAL	522112	16.174.959
222	027	KEMENTERIAN SOSIAL	522113	32.446.052
223	027	KEMENTERIAN SOSIAL	524113	660.000
224	027	KEMENTERIAN SOSIAL	524119	1.500.000
225	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	512111	242.252.344
226	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	522111	1.312.553.370
227	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	522112	75.219.838
228	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	522119	657.648.426
229	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	511111	819.119.761
230	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	522111	1.617.929.207
231	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	511111	512.000
232	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	511129	67.194.000
233	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	511511	3.499.060
234	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	512111	3.820.000
235	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	521111	6.280.600
236	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	521119	6.028.000
237	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	522111	356.087.689
238	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	522112	102.547.905
239	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	522113	43.886.496
240	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	522119	807.872.671
241	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	522111	23.228.845
242	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	522112	37.785.073
243	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	522111	23.189.872
244	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	522112	52.167.266
245	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511111	2.837.800
246	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511119	772
247	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511121	200.000
248	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511122	47.380
249	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511123	5.970.000
250	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511125	206.600
251	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	511126	51.472.760
252	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	522111	185.465.548
253	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	522112	19.113.371
254	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	522113	509.008
255	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	511111	17.947.109
256	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	511123	41.000.345
257	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	522111	524.805.961
258	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	522112	44.822.146
259	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	511111	8.494.373
260	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	522111	59.036.834
261	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511111	17.847.000
262	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511119	2.682
263	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511121	1.375.570
264	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511122	262.918
265	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511124	6.000.000
266	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511125	1.132.450

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
267	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511126	813.600
268	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511147	12.699.600
269	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	511151	120.000
270	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	511111	2.908.200
271	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	511119	156
272	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	511121	241.320
273	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	511122	48.378
274	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	511125	459.794
275	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	511129	87.529.000
276	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511111	123.744.140
277	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511119	102.096
278	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511121	4.984.470
279	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511122	2.011.814
280	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511123	20.384.393
281	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511124	25.798.121
282	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511125	9.354.591
283	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511126	41.425.352
284	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511129	5.514.425.171
285	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511147	6.038.000
286	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511151	425.000
287	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521111	92.329.857
288	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521113	1.990.381
289	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521114	836.210
290	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521115	35.000
291	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521219	170.000
292	054	BADAN PUSAT STATISTIK	522111	707.888.166
293	054	BADAN PUSAT STATISTIK	522112	150.093.186
294	054	BADAN PUSAT STATISTIK	522113	52.621.478
295	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511111	135.154.093
296	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511119	16.260
297	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511121	3.427.792
298	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511122	3.611.299
299	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511123	28.772.572
300	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511124	935.000
301	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511125	17.276.224
302	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511126	39.544.956
303	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511129	524.552.992
304	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511135	125.000
305	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511138	500.000
306	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511147	12.838.500
307	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511151	2.161.110
308	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	521111	48.752.861
309	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	521114	2.234.230
310	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	521213	1.703.568
311	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	521219	1.900.000
312	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522111	1.223.060.752
313	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522112	132.969.101
314	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522113	115.403.816
315	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522119	11.314.185
316	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522121	179.240
317	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522191	814.000
318	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	533111	238.358.464
319	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	511111	39.060.500
320	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	522113	1.625.300

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
321	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	524111	2.090.000
322	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	511111	215.911.404
323	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	522111	488.843.789
324	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511176	5.132.198
325	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511179	827.379.372
326	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511192	33.457.200
327	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511211	124.122.225
328	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511226	296.634.916
329	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511232	900.000
330	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511233	5.100.000
331	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511235	8.400.000
332	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511242	61.499.800
333	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	512411	13.326.850
334	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	513211	255.713.828
335	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521111	3.730.854.216
336	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521112	11.489.145.346
337	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521114	533.000
338	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521119	2.360.130.405
339	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521213	36.969.000
340	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	522111	45.770.802.564
341	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	522112	18.217.810.225
342	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	522113	3.950.087.450
343	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	524111	233.696.900
344	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	525113	2.449.074.029
345	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	532111	1.692.204.000
346	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511111	70.677.936
347	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511119	21.461
348	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511121	870.240
349	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511122	290.654
350	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511123	4.766.873
351	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511124	4.280.000
352	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511125	7.548.580
353	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511126	6.404.840
354	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511129	22.898.000
355	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	521111	50.213.522
356	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	521211	533.000
357	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522111	1.380.071.178
358	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522112	71.141.400
359	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522113	31.460.037
360	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522119	13.000.000
361	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522141	79.480.000
362	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	532111	89.090.820
363	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511111	8.473.200
364	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511119	603
365	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511121	782.220
366	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511122	154.392
367	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511124	21.000.000
368	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511125	1.473.368
369	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	511126	101.700
370	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	522111	342.949.110
371	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	522111	428.114.401
372	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	511111	1.648.900
373	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	511124	12.288.860
374	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	512411	235.190.800

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
375	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	521219	32.500.000
376	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	522111	332.629.102
377	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	522112	64.287.385
378	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	522113	5.241.262
379	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	522119	55.137.415
380	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	522141	28.199.999
381	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511111	200.014.200
382	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511119	14.471
383	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511121	3.135.462
384	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511122	1.462.451
385	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511123	7.231.410
386	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511124	33.166.060
387	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511125	5.820.476
388	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511126	13.006.572
389	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511129	485.004.150
390	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511135	200.000
391	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511138	2.400.000
392	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511151	12.225.000
393	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511153	660.000
394	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	521111	3.837.200
395	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	521114	780.000
396	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	521219	51.147.500
397	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	521119	4.589.595
398	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	522111	87.906.575
399	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	522112	188.249.383
400	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	522113	25.294.438
401	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	522141	2.312.165
402	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511111	888.600
403	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511121	88.860
404	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511122	35.544
405	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511124	5.985.000
406	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511125	145.028
407	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511311	840.000
408	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511321	84.000
409	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511322	25.200
410	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511323	9.200.000
411	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511324	1.730.728
412	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	511325	40
413	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	522111	398.606.474
414	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	522112	17.614.113
415	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511111	53.398.971
416	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511119	27.626
417	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511121	3.091.650
418	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511122	719.584
419	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511124	128.460.000
420	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511125	5.760.620
421	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511126	32.321.762
422	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511129	8.631.000
423	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	511151	395.000
424	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	521111	5.747.676
425	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	521213	345.000
426	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	521219	300.049.875
427	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	522111	700.988.589
428	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	522112	105.450.315

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
429	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	522113	129.036.633
430	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	522119	14.320.205
431	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	524119	167.325.000
432	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	511111	214.024.981
433	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	522191	33.272.250
434	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	522111	2.419.163.968
435	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	522112	19.014.478
436	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	522113	3.096.991
437	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	521119	167.693.363
438	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	522111	349.014.405
439	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	522112	125.778.448
440	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	522113	3.521.500
441	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	522141	750.000
442	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	523199	1.184.334.500
443	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511111	8.250.145
444	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511119	448
445	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511121	131.680
446	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511122	44.800
447	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511124	19.057.054
448	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511125	463.590
449	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	511151	3.420.000
450	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	521111	1.873.000
451	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	522111	284.582.009
452	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	522112	21.318.223
453	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	522113	2.384.400
454	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	523121	492.613
455	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	525119	437.213.593
456	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	522112	13.517.859
457	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	522111	223.322.678
458	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	522112	18.887.358
459	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	522113	25.000
460	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	522119	335.000
461	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	522191	2.025.000
462	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511111	8.123.150
463	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511119	282
464	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511124	13.505.000
465	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511121	167.460
466	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511122	66.318
467	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511125	397.424
468	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511129	202.522.000
469	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	511126	74.580
470	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	512411	2.240.566.027
471	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	522111	136.182.906
472	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	522112	22.880.403
473	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	522113	336.858
474	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	511111	7.598.600
475	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	511119	1.056
476	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	511121	475.480
477	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	511122	104.150
478	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	511125	388.994
479	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	522111	468.501.150
480	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	522112	8.966.770
481	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	522113	3.462.100
482	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511119	6.029

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
483	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511121	3.058.430
484	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511122	917.514
485	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511123	39.360.000
486	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511124	32.165.000
487	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511125	11.193.815
488	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511151	75.000
489	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511111	469.810
490	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	521111	6.473.004
491	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	522111	884.537.546
492	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	522112	50.575.256
493	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	522113	10.090.939
494	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511111	553.647.154
495	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511119	47.586
496	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511121	4.905.816
497	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511122	1.108.606
498	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511123	1.080.000
499	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511124	18.270.000
500	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511125	8.896.863
501	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511129	9.457.049
502	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511138	395.249.500
503	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511151	40.000
504	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	512211	9.872.000
505	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	512411	1.533.583
506	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	521111	825.000
507	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	521114	5.408.785
508	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522111	1.000.761.039
509	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522111	876.394.662
510	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522112	78.289.373
511	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522113	46.077.004
512	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522119	28.160
513	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522141	511.790.704
514	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	511129	22.435.250
515	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	521115	41.279.500
516	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522112	131.068.007
517	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522141	25.580.678.257
518	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	533121	979.672.000
519	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511511	18.601.803
520	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511512	5.136.221.350
521	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511519	527.083.403
522	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	522111	285.829.540
523	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	522112	41.721.029
524	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	522113	52.683.320
525	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	522111	347.900.176
526	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	522112	55.587.264
527	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	522113	2.336.553
528	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	522119	8.264.390
529	100	KOMISI YUDISIAL RI	511111	2.844.506
530	100	KOMISI YUDISIAL RI	511126	6.950.662
531	100	KOMISI YUDISIAL RI	522113	477.772
532	100	KOMISI YUDISIAL RI	522141	5.888.540
533	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	522141	28.380.000
534	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	522111	131.608.703
535	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	522112	23.571.818
536	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	533111	1.172.679.200

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
537	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	521111	267.950.075
538	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511111	10.558.500
539	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511121	1.055.850
540	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511122	408.108
541	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511123	1.620.000
542	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511126	810.000
543	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511125	163.506
544	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	511119	339
545	104	BNP2TKI	511129	130.983.950
546	104	BNP2TKI	522111	267.439.169
547	104	BNP2TKI	522112	15.655.169
548	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	524114	396.000.000
549	107	BADAN SAR NASIONAL	511111	45.499.684
550	107	BADAN SAR NASIONAL	522111	456.619.820
551	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	522112	3.667.224
552	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	522112	6.983.822
553	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	521114	12.468.543
554	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	522111	121.100.000
555	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	511111	32.630.961
556	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	522111	78.011.969
557	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511111	11.780.062
558	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511119	4.326
559	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511121	1.098.020
560	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511122	4.596
561	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511124	650.000
562	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511125	193.938
563	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511126	1.280.680
564	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511151	1.090.000
565	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	521111	9.686.400
566	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522111	296.762.422
567	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522112	12.040.825
568	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522113	4.360.245
569	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522119	70.134.833
570	999.01	PENGELOLAAN UTANG	541411	2.757.130.034.795
571	999.01	PENGELOLAAN UTANG	541251	24.955.111.278.197
572	999.01	PENGELOLAAN UTANG	542121	11.298.923.801.000
573	999.07	BELANJA SUBSIDI	551213	9.002.572.108.413
574	999.07	BELANJA SUBSIDI	551215	5.337.277.214.175
575	999.07	BELANJA SUBSIDI	551217	781.574.594.702
576	999.07	BELANJA SUBSIDI	551218	3.834.047.885.390
577	999.07	BELANJA SUBSIDI	551312	771.397.714.255
578	999.07	BELANJA SUBSIDI	551316	6.637.127.697.933
579	999.08	BELANJA LAINNYA	581919	38.256.566.060
		TOTAL		2.579.120.412.527

BELANJA DIBAYAR DI MUKA
Tahun anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511111	575.899.504
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511119	496.808
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511121	13.823.810
4	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511122	3.359.256
5	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511123	15.520.000
6	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511124	298.839.820
7	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511125	11.557.475
8	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511126	332.208.884
9	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511129	268.228.850
10	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511138	3.575.000
11	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511147	12.761.700
12	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	511151	4.760.000
13	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	512411	34.108.079.727
14	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	521111	26.394.538
15	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	521213	8.315.000
16	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522111	772.068.288
17	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522112	83.336.166
18	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522131	31.445.752
19	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522119	8.584.490
20	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	522141	609.931.342
21	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	524111	1.342.095.860
22	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	521119	620.000
23	006	KEJAKSAAN AGUNG	511111	1.011.480
24	005	MAHKAMAH AGUNG	511111	3.820.712.202
25	005	MAHKAMAH AGUNG	511119	77.652
26	005	MAHKAMAH AGUNG	511121	165.407.502
27	005	MAHKAMAH AGUNG	511122	48.452.015
28	005	MAHKAMAH AGUNG	511123	24.770.000
29	005	MAHKAMAH AGUNG	511124	5.900.179.918
30	005	MAHKAMAH AGUNG	511125	2.420.070.071
31	005	MAHKAMAH AGUNG	511126	153.431.732
32	005	MAHKAMAH AGUNG	511127	1.350.000
33	005	MAHKAMAH AGUNG	511129	832.087.710
34	005	MAHKAMAH AGUNG	511151	19.285.000
35	005	MAHKAMAH AGUNG	511157	351.500.000
36	005	MAHKAMAH AGUNG	511158	13.800.000
37	005	MAHKAMAH AGUNG	511161	427.653
38	005	MAHKAMAH AGUNG	511179	36.439.768
39	005	MAHKAMAH AGUNG	511224	13.396.250
40	005	MAHKAMAH AGUNG	512211	22.653.250
41	005	MAHKAMAH AGUNG	521111	214.429.289
42	005	MAHKAMAH AGUNG	521112	123.831
43	005	MAHKAMAH AGUNG	521114	78.321.956
44	005	MAHKAMAH AGUNG	521115	32.100.000
45	005	MAHKAMAH AGUNG	521119	15.920.000
46	005	MAHKAMAH AGUNG	522111	522.621.423
47	005	MAHKAMAH AGUNG	522112	52.069.022
48	005	MAHKAMAH AGUNG	522113	154.011.714
49	005	MAHKAMAH AGUNG	522119	181.437.360
50	005	MAHKAMAH AGUNG	522121	1.491.368
51	005	MAHKAMAH AGUNG	522141	74.651.340
52	005	MAHKAMAH AGUNG	522211	7.504.946
53	005	MAHKAMAH AGUNG	523111	22.545.897
54	005	MAHKAMAH AGUNG	523121	33.693.330
55	005	MAHKAMAH AGUNG	524111	130.479.500
56	005	MAHKAMAH AGUNG	524119	135.750.000
57	005	MAHKAMAH AGUNG	525112	117.000
58	005	MAHKAMAH AGUNG	525113	188.700

BELANJA DIBAYAR DI MUKA
Tahun anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
59	005	MAHKAMAH AGUNG	532111	9.000.000
60	005	MAHKAMAH AGUNG	533111	55.800.000
61	007	KEPRESIDENAN	521111	11.644.713
62	007	KEPRESIDENAN	522111	1.558.463.739
63	007	KEPRESIDENAN	522119	50.372.735
64	007	KEPRESIDENAN	525112	16.140.015.320
65	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	522141	10.128.530
66	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511111	877.293.529
67	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511119	66.729
68	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511121	23.267.606
69	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511122	7.714.183
70	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511123	12.713.410
71	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511124	16.317.173
72	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511125	12.308.299
73	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511126	107.482.696
74	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511129	566.626.980
75	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511138	200.000
76	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511147	33.556.758
77	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	511151	63.600.000
78	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	512211	282.842.650
79	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521111	52.336.120
80	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521114	27.896.180
81	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521119	5.428.727
82	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521211	190.630.797
83	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521213	346.340.200
84	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	521219	60.922.830
85	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522111	2.974.682.560
86	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522112	286.226.745
87	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522113	108.925.927
88	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522119	3.640.763
89	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522131	63.325.250
90	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	522141	26.111.592.745
91	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	523111	2.212.000
92	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	523121	1.825.225
93	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	524119	81.117.500
94	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525111	65.058.176
95	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525112	11.149.577
96	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525113	248.544.000
97	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525114	1.645.591
98	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525116	42.893.598.290
99	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	525119	1.275.510.720
100	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	533111	89.575.654
101	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	533121	1.247.726.716
102	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	536111	91.572.000
103	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	522111	92.252.461
104	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511111	5.908.000
105	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511119	1.025
106	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511121	312.760
107	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511122	46.058
108	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511123	7.560.000
109	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	511125	582.834
110	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511111	208.418.729
111	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511119	460
112	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511121	162.750
113	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511122	57.150
114	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511123	21.406.149
115	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511124	2.600.000
116	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511125	3.374.368

BELANJA DIBAYAR DI MUKA
Tahun anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
117	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	511129	680.787.970
118	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522111	157.836.737
119	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522112	4.811.543
120	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522113	29.743.755
121	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	522141	212.083.334
122	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	536111	21.275.413.328
123	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511111	45.848.095
124	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	511129	418.250.000
125	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	521111	130.935.180
126	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522111	1.697.675.538
127	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522112	46.403.168
128	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	522113	78.917.013
129	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	525111	60.025.936
130	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	511111	563.949.706
131	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	521219	13.470.954.607
132	025	KEMENTERIAN AGAMA	521219	33.638.351.168
133	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	522141	1.239.008.541
134	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	522141	215.640.000
135	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	522141	179.752.667
136	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511121	628.320
137	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511129	812.596.500
138	054	BADAN PUSAT STATISTIK	511151	1.280.000
139	054	BADAN PUSAT STATISTIK	512411	147.198.287
140	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521211	28.595.680
141	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521213	83.820.040
142	054	BADAN PUSAT STATISTIK	521219	12.053.100
143	054	BADAN PUSAT STATISTIK	522111	9.351.100
144	054	BADAN PUSAT STATISTIK	522141	452.391.697
145	054	BADAN PUSAT STATISTIK	522151	33.621.000
146	054	BADAN PUSAT STATISTIK	524119	59.270.000
147	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	511151	185.000
148	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	522141	126.156.664
149	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511176	358.788.845
150	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511179	1.372.696.981
151	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511226	11.783.010.128
152	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	511242	8.000.000
153	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521112	3.286.986.050
154	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521114	239.205.988
155	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	521119	1.063.285.500
156	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	522111	30.712.140.931
157	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	522112	6.671.661.940
158	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	522113	3.646.692.842
159	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	524111	131.246.000
160	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511111	17.023.210
161	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511119	3.870
162	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511121	905.650
163	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511122	237.068
164	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511123	3.980.000
165	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511125	1.663.488
166	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511129	4.687.000
167	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	511151	415.000
168	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	521111	410.487.017
169	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	521219	11.683.916
170	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522111	510.490.830
171	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522112	48.440.608
172	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522113	5.918.146
173	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	522141	63.357.334
174	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	522141	134.250.100

BELANJA DIBAYAR DI MUKA
Tahun anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
175	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	522111	436.816.580
176	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	522141	3.050.269.157
177	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	521211	128.277.500
178	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	532111	22.946.000
179	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	522141	7.500.000
180	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	522111	150.850.865
181	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	522112	98.934.602
182	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	522119	889.937.789
183	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	521219	13.436.748.600
184	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	522113	2.624.822.408
185	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	522113	489.498.300
186	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	511151	1.650.405
187	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	522119	118.536.000
188	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511111	214.898.539
189	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511119	1.815
190	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511121	3.251.617
191	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511122	796.678
192	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511123	895.000
193	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511124	15.147.830
194	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511125	4.517.240
195	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511129	76.092.730
196	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511138	154.300.000
197	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511147	25.000
198	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	511151	9.670.400
199	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	512211	1.264.132
200	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	521111	925.000
201	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	521114	7.219.985
202	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	521219	1.441.203
203	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522111	586.161.695
204	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522111	495.209.045
205	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522112	58.169.115
206	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522113	32.783.535
207	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	522141	587.088.620
208	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	511111	7.176.114
209	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	511121	83.340
210	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	511122	31.002
211	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	511125	44.633
212	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	511129	15.382.000
213	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	512411	10.709.713.661
214	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	521111	1.502.900
215	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522111	75.247.294
216	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522112	34.141.179
217	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522113	293.500
218	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522141	3.829.814.513
219	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	522191	36.400.000
220	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	533111	244.700.000
221	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	533113	3.686.000
222	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511511	148.154.562
223	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511512	3.277.457.886
224	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511513	24.379
225	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	511519	897.247.292
226	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	522111	209.167.500
227	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	522112	47.652.700
228	093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	522113	26.889.720
229	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	522141	427.731.233
230	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	521219	243.746.800
231	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	522141	7.923.206.500
232	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	521219	159.000.000

BELANJA DIBAYAR DI MUKA
Tahun anggaran 2013
(dalam rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	MATA ANGGARAN	JUMLAH
233	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	521114	23.119.589
234	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	522141	1.494.498.000
235	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	522141	5.170.885.000
236	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511111	291.000
237	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511121	29.100
238	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511122	11.640
239	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511125	16.454
240	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	511151	15.000
241	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522111	55.793.890
242	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522112	2.503.013
243	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	522119	1.163.973
244	999.08	BELANJA LAINNYA	581919	102.306.129.667
		TOTAL		447.918.385.771



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
JL. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA PUSAT**